

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN I TAHUN 2023

BALAI BESAR POM DI MATARAM

Jl. Catur Warga, Kota Mataram 83121

(0370) Ka. 622297. YU/ULPK

bbpommataram 

bbpommataram.official 

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) pada Triwulan I Tahun 2023.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja Triwulan I terhadap target tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram pada triwulan berikutnya.

Mataram, 26 April 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Mataram,



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Mataram Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 mengacu pada Reviu Rencana strategis (Renstra) BBPOM di Mataram tahun 2020-2024. Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Mataram tahun 2020-2024, terdapat 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama (IKU). Pada triwulan I tahun 2023 hanya 7 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur capaiannya.

Dari 7 sasaran strategis BBPOM di Mataram yang diukur capaiannya pada triwulan I tahun 2023 diperoleh 4 sasaran strategis dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPS) dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”, 2 sasaran strategis dengan kriteria NPS “belum memenuhi ekspektasi” dan 1 sasaran strategis dengan kriteria NPS “tidak dapat disimpulkan”.

Hasil capaian tiap sasaran strategis sampai Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram” sebesar 93,87% dengan kriteria BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI, menunjukkan BBPOM di Mataram kurang efektif dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Capaian indikator sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram” sebesar 79,58% dengan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI, menunjukkan BBPOM di Mataram tidak efektif meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Capaian indikator sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan” sebesar 104,39% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI menunjukkan BBPOM di Mataram efektif dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Capaian indikator sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram” sebesar 120,0% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI menunjukkan keberhasilan BBPOM di Mataram dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Capaian indikator sasaran strategis ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram” sebesar 262,25% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini menunjukkan keberhasilan BBPOM di Mataram dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Capaian indikator sasaran strategis kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” sebesar 100% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, menunjukkan BBPOM di Mataram telah berhasil dalam meningkatkan penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
- Capaian indikator sasaran strategis kesebelas “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel” sebesar 111,56% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, menunjukkan BBPOM di Mataram telah berhasil dalam pengelolaan keuangan UPT secara akuntabel.

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sampai triwulan I Tahun 2023, dilakukan pengukuran terhadap 29 indikator kinerja utama (IKU) dengan hasil 7 indikator yang capaiannya dengan kategori MEMENUHI EKSPEKTASI, 8 indikator dengan kategori MEMENUHI EKSPEKTASI, 1 indikator dengan kategori TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI serta 4 indikator dengan kategori TIDAK DAPAT DISIMPULKAN.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Mataram sampai triwulan I Tahun 2023 antara 8,97% sampai dengan 261,25%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” sebesar 8,97%. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

“Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan” sebesar 261,25%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Mataram didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar 23,995,139,000,-. Realisasi anggaran sampai Triwulan I tahun 2023 adalah Rp. . 3,705,399,346 atau 15,44%.

Balai Besar POM di Mataram berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga seluruh sasaran strategis pada akhir tahun 2023 dapat tercapai.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	11
I.2. Gambaran Umum Organisasi	12
I.3. Struktur Organisasi	14
I.4. Isu Strategis	15
I.5. Analisis Lingkungan Strategis	23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	42
III.2 Realisasi Anggaran	110
BAB IV. PENUTUP	
IV.1. Kesimpulan	112
IV.2.Saran	114
LAMPIRAN	115

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Empat Inti Kegiatan Fungsi BBOM di Mataram	13
Gambar 1.2 Wilayah Kerja BBPOM di Mataram	14
Gambar 1.3 Struktur Organisasi BBPOM di Mataram	14
Gambar 1.4 Peta wilayah Provinsi NTB.....	25
Gambar 1.5 Grafik Sarana Produksi di Wilayah Provinsi NTB Tahun 2023.....	26
Gambar 1.6 Grafik Sarana Distribusi di Wilayah Provinsi NTB Tahun 2023	26
Gambar 3.1 Indikator Pembentuk Indeks kesadaran masyarakat	63
Gambar 3.2 Bobot penilaian masing-masing komponen AKIP	102

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kebutuhan SDM BBPOM di Mataram Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)	23
Tabel 2.1 Indikator dan Target Sasaran Strategis 1	29
Tabel 2.2. Indikator dan Target Sasaran Strategis 3	31
Tabel 2.3. Indikator dan Target Sasaran Strategis 4	31
Tabel 2.4. Indikator dan Target Sasaran Strategis 5	32
Tabel 2.5. Indikator dan Target Sasaran Strategis 6	32
Tabel 2.6. Indikator dan Target Sasaran Strategis 8	34
Tabel 2.7. Indikator dan Target Sasaran Strategis 10	35
Tabel 2.8. Indikator dan Target Sasaran Strategis 11	35
Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2023	36
Tabel 2.10. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	38
Tabel 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis BBPOM di Mataram	42
Tabel 3.2 Target Realisasi dan Capaian IKU BBPOM Mataram sampai TW 1 Tahun 2023	43
Tabel 3.3 Target Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	48
Tabel 3.4 Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional (OT) , suplemen kesehatan (SK), kosmetik dan obat kuasi dengan metode sampling random/ acak triwulan I tahun 2023	49
Tabel 3.5 Target Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	51
Tabel 3.6 Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel makanan dengan metode sampling random/ acak Triwulan I tahun 2023	52
Tabel 3.7 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	54
Tabel 3.8 Hasil pemeriksaan pengujian sampel obat, obat tradisional (OT), Suplemen kesehatan (SK) dan kosmetik dengan metode sampling targeted Triwulan I tahun 2023	55
Tabel 3.9 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	58
Tabel 3.10 Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel makanan dengan metode sampling targeted pada Triwulan I tahun 2023	58
Tabel 3.11 Target Realisasi dan Capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi	

syarat	60
Tabel 3.12 Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada Triwulan I tahun 2023	61
Tabel 3.13 Indikator dan Target Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Ketiga	64
Tabel 3.14 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan	66
Tabel 3.15 Rincian Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan Berdasarkan Jenis Keputusan/Rekomendasi	67
Tabel 3.16 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	69
Tabel 3.17 Rincian Tindak Lanjut Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Berdasarkan Jenis Keputusan/Rekomendasi	70
Tabel 3.18 Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran kegiatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I tahun 2023	72
Tabel 3.19 Jumlah keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I tahun 2023	72
Tabel 3.20 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	74
Tabel 3.21 Rincian Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	75
Tabel 3.22 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	77
Tabel 3.23 Rincian Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	78
Tabel 3.24 Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran kegiatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I tahun 2023	80
Tabel 3.25 Realisasi UMKM yang memenuhi standar produksi berdasarkan jenis komoditi Triwulan I tahun 2023	81
Tabel 3.26 Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas KIE	83
Tabel 3.27 Nilai masing-masing parameter penyusun tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	84
Tabel 3.28 Target dan Realisasi serta capaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	85
Tabel 3.29 Realisasi progress jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah	

(PJAS) aman	86
Tabel 3.30 Target dan Progres Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman	87
Tabel 3.31 Realisasi progress jumlah desa pangan aman	88
Tabel 3.32 Target dan progress realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	90
Tabel 3.33 Realisasi progress jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	90
Tabel 3.34 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai Setandar	92
Tabel 3.35 Rincian realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I tahun 2023	93
Tabel 3.36 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar	95
Tabel 3.37 Rincian realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	96
Tabel 3.38 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja sasaran strategis Triwulan I tahun 2023 .	97
Tabel 3.39 Target dan Realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Triwulan I tahun 2023 ...	98
Tabel 3.40 Indikator dan Target Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis ke delapan	101
Tabel 3.41 Target indeks profesionalitas ASN BBPOM di Mataram tahun 2023	103
Tabel 3.42 Indikator dan Target Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis kesepuluh	104
Tabel 3.43 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM Mataram yang Optimal	105
Tabel 3.44 Indikator dan target kinerja pencapaian sasaran strategis kesebelas	107
Tabel 3.45 Target, Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram	107
Tabel 3.46 Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja Triwulan I tahun 2023	110

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

BBPOM di Mataram sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Interim BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023 merujuk kepada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Mataram tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram tahun 2023.

I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

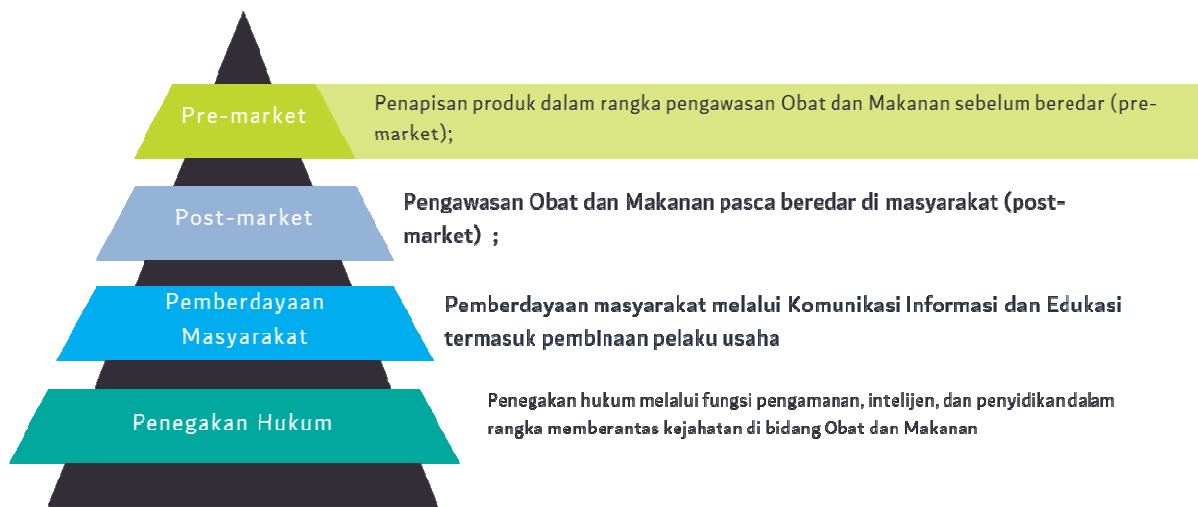


Balai Besar POM (BBPOM) di Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111).

Peraturan PerUndang-Undangan (UU) yang menjadi landasan teknis tugas dan fungsi BBPOM di Mataram antara lain (i) UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika; (ii) UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (iii) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (iv) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;(v) UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; (vi) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (vii); PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi; (viii) PP Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian; (ix) PP Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;(x) PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan; (xi) PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (xii) PP Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan; dan (xiii) PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

BBPOM di Mataram secara garis besar memiliki empat inti kegiatan dilihat dari fungsinya, yaitu:



Gambar 1.1 Empat Inti Kegiatan Fungsi BBOM di Mataram

BBPOM di Mataram sebagai UPT Badan POM memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram antara lain:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan



Pulau Lombok

- 1. Kota Mataram
- 2. Kab. Lombok Utara
- 3. Kab. Lombok Timur
- 4. Kab. Lombok Tengah
- 5. Kab. Lombok Barat

Pulau Sumbawa

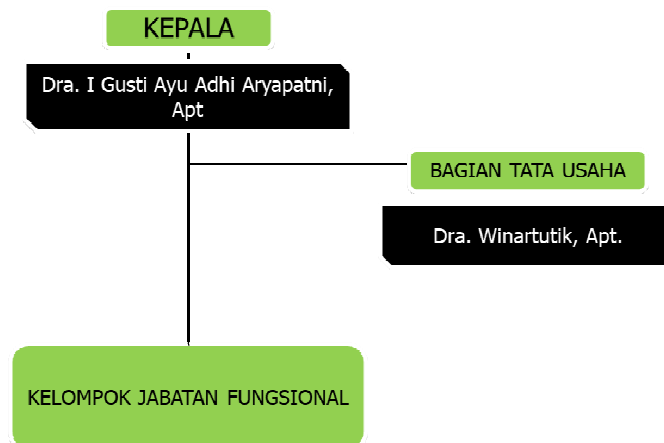
- 6. Kab. Sumbawa Barat
- 7. Kab. Sumbawa

Gambar 1.2 Wilayah Kerja BBOM di Mataram

I.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Mataram disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Mataram

I.4 ISU STRATEGIS**KASUS STUNTING DI NTB**

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan

menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization (WHO)* dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Kemenkes Tahun 2022, angka *stunting* di NTB berada pada 32,7% naik 1,3% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 31,4%. Angka *stunting* ini berada di atas angka nasional sebesar 21,6% turun sebesar 2,8% dibandingkan tahun 2021 sebesar 24,4%. BBPOM di Mataram mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui beberapa program antara lain pengawasan pangan fortifikasi (Sampling dan pengujian, serta pendampingan pelaku usaha), intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN) DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, BBPOM di Mataram melaksanakan pengawasan/inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PERUBAHAN GAYA HIDUP MASYARAKAT

Industri Obat dan Makanan menjadi salah satu bidang yang terdampak oleh munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Perkembangan teknologi tersebut memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Keberagaman produk tersebut membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan. Hal ini menjadi tantangan bagi BPOM termasuk BBPOM di Mataram untuk meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian, baik pemenuhan instrumen pengujian dan metode analisis yang diperlukan serta kompetensi penguji yang memadai.

Dampak revolusi industri 4.0 pada akhirnya juga berdampak terhadap perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya pemanfaatan teknologi internet. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Dampak *E-commerce* termasuk produk Obat dan Makanan menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat Provinsi NTB. Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2019 menginformasikan bahwa Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan '*e-commerce*' dengan pertumbuhan 78 persen dan berada di peringkat ke-1 dunia. Obat dan Makanan yang dijual situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

BPOM khususnya BBPOM di Mataram harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan. Terkait dengan hal ini, BBPOM di Mataram dalam pelaksanaan pengawasan dan penyebaran informasi tentang Obat dan Makanan harus lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi terutama berbagai aplikasi yang dikembangkan oleh Badan POM maupun hasil inovasi BBPOM di Mataram sendiri. Selain itu, BBPOM di Mataram juga melakukan patrol siber untuk mengantisipasi dan menjawab tantangan kemajuan teknologi yang mengakibatkan pergeseran pola promosi, pola konsumsi, dan pola distribusi dalam peredaran Obat dan Makanan.

REFORMASI BIROKRASI



Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai

Besar POM di Mataram pada tahun 2023 telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan bertekad meraih predikat WBBM di tahun 2023, sehingga diperlukan upaya sosialisasi program pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kemudahan akses informasi publik.

PANDEMI COVID-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 Provinsi NTB, Jumlah yang terkonfirmasi Covid-19 per 31 Desember 2022 sebanyak 37.168 kasus, dan meninggal dunia sebanyak 1025. Pada tahun 2022 pemerintah tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Sebagai bentuk peran serta penanganan Covid-19 BBPOM di Mataram melakukan pengawalan dan pemantauan dalam memastikan vaksin Covid 19 di NTB telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) untuk menjamin mutu dan kualitas vaksin Covid 19 mulai dari jalur distribusi sampai kemudian digunakan oleh masyarakat. Selain itu, BBPOM di Mataram telah memperoleh izin dari Badan



Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai laboratorium penguji specimen covid 19. Laboratorium BBPOM di Mataram telah memenuhi persyaratan Standar Laboratorium Bio Safety Level 2 (BSL-2) dan peningkatan SDM Pengujian sebagai Laboratorium Pemeriksaan Spesimen Covid-19.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun atau dengan *hand sanitizer*, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan

desinfektan, mengurangi mobilitas, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin

INDUSTRIALISASI DAN PENGUATAN UMKM DI NTB GEMILANG



Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan II-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,99 persen dibandingkan triwulan II-2021 berdasarkan data rilis BPS. Pertumbuhan ini menandakan mulai pulihnya aktivitas perekonomian setelah dihantam pandemi Covid-19. Hal ini juga pertanda penyebaran pandemi tertangani dengan baik melalui berbagai program dari pemerintah. Pertumbuhan ini tidak lepas dari kontribusi UMKM dalam kemampuan menyerap tenaga kerja yang ada serta menghimpun investasi.

Salah satu Lapangan Usaha yang menyumbang pertumbuhan ekonomi berasal dari Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 34,97 persen. Jika dilihat menurut kelompok industri berdasarkan KBLI dua digit maka industri makanan (KBLI 10) merupakan usaha terbesar kedua di bawah Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya (KBLI 16).

Potensi pengembangan UMKM juga didorong oleh ditetapkannya KEK Mandalika sebagai salah satu dari 5 (lima) Destinasi Super Prioritas Nasional oleh Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2021 bersama K/L terkait untuk menjadi “Bali Baru” melalui pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, produk ekonomi kreatif dan SDM unggul. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dikembangkan adalah pembangunan sirkuit di Desa Kuta, Lombok Tengah yang diberi nama Pertamina Mandalika International Street Circuit. Di sirkuit tersebut telah sukses dilaksanakan perhelatan internasional MotoGP pada bulan Maret 2022 dan World Superbike Championship pada Oktober 2022

Jumlah UMKM di NTB dari tahun ke tahun terus berkembang, namun demikian secara umum UMKM masih menghadapi kendala klasik seperti permodalan, perizinan, bahan baku, pemasaran produk, pengelolaan keuangan dan inovasi. Selain itu, data hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan menemukan sebanyak 47% sarana UMKM Tidak Memenuhi Ketentuan. Demikian pula dengan data hasil pengujian produk pangan olahan yang Tidak Memenuhi Syarat memiliki persentase lebih tinggi yaitu 76%.

Ketidaksesuaian di atas disebabkan oleh: (1) kurangnya komitmen pelaku usaha pangan dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan; (2) keterbatasan kapasitas yaitu kemampuan dan pengetahuan serta kesadaran pelaku usaha pangan terhadap mutu dan keamanan pangan; (3)

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang mutu dan keamanan pangan; dan (4) keterbatasan kelembagaan pangan terkait pengawasan mutu dan keamanan pangan.



Salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi NTB meningkatkan daya saing UMKM yaitu melakukan program strategis industrialisasi, yang di antaranya bertumpu pada industri pengolahan (pertanian, peternakan, lingkungan, kehutanan, dan kelautan). Jenis industri yang dikembangkan di NTB adalah industri rumah tangga atau industri berskala mikro maupun kecil dengan pertimbangan ketersediaan bahan baku dan pangsa pasar yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Dalam konteks industrialisasi, yang menjadi sarannya adalah peningkatan nilai tambah terutama pada komoditas pertanian sehingga pendapatan masyarakat juga ikut meningkat.

Sejalan dengan hal tersebut, BBPOM di Mataram juga berkontribusi bersinergi dengan OPD terkait melalui program pembinaan kepada UMKM agar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk sehingga meningkatkan daya saing UMKM. Dukungan yang diberikan oleh BPOM terhadap UMKM antara lain diwujudkan dengan memberikan kemudahan melalui berbagai upaya percepatan, penyederhanaan, dan pendampingan kepada UMKM. Pada tahun 2022 BBPOM di Mataram melakukan revitalisasi inovasi **GEMILANG Pro-UMKM** yang telah melakukan pendampingan UMKM dan berhasil menerbitkan 370 sertifikat / izin penerapan / rekomendasi kepada 48 pelaku usaha.

.PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Provinsi NTB merebak isu penyalahgunaan PCC, Carnophen, Somadril, tramadol dan trihexyphenidil. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di Provinsi NTB peredaran gelap Tramadol sangat memprihatinkan, Tramadol bukan hanya menasar orang dewasa termasuk remaja juga menjadi target sasaran. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2022 kasus peredaran gelap Tramadol, Trihexyphenidyl, dextromethorphan dan oat obat tertentu (OOT) lainnya di Provinsi NTB tercatat mencapai 140 kasus

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023



Adanya temuan produk ilegal mengindikasikan bahwa *supply* dan *demand* terhadap sediaan farmasi ilegal masih tinggi. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses pembelian (secara online) menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena kepraktisannya. Disisi lain, temuan ini juga

mengindikasikan bahwa Badan POM dan Polri secara terus menerus berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman.

Adanya ancaman peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal yang sangat serius menyebabkan Presiden RI mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat pada Oktober 2017, agar secara serentak aksi nasional lintas sektor dilaksanakan di 34 Provinsi termasuk di Provinsi NTB, bersama dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait. Dalam Aksi Nasional ini koordinasi dan kerjasama terpadu diperluas dengan pemangku kepentingan di daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum untuk memberikan efek jera.

Akhir-akhir ini trend dan modus kejahatan Obat dan makanan terlihat mengikuti perkembangan melalui *media online*, jika ini tidak diantisipasi akan menyebabkan tidak optimalnya/gagalnya operasi penyidikan pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan makanan. BBPOM di Mataram juga menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan tidak dapat ditangani sendiri karena produksi dan peredaran Obat dan Makanan ilegal begitu cepat dan luas, sehingga perlu dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait terutama dalam jaringan "*Criminal Justice Sistem (CJS)*" dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan serta ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia) dan idEA (*Indonesian E-Commerce Association*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, harus dimulai dari semangat dan persamaan persepsi antar penegak hukum bahwa tindak pidana di bidang Obat dan Makanan adalah termasuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan saat ini serta berpengaruh besar terhadap kehidupan generasi penerus di masa mendatang.

KEAMANAN PANGAN DI DESA

Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, jumlah penduduk Provinsi NTB sebanyak 5,43 juta jiwa pada Juni 2022, dengan proporsi penduduk lebih banyak tinggal di pedesaan. Pembangunan berkelanjutan di desa saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa. SDGs Desa sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB, yang memiliki 17 tujuan atau *goals*. Oleh karena itu pembangunan yang menerapkan SDGs Desa, maka dapat membantu pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kurang lebih 80 % penduduk berada di pedesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan, sehingga pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2022 BBPOM di Mataram baru dapat mengintervensi 195 desa/kelurahan dari 1.150 desa/kelurahan yang ada di Provinsi NTB. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat mereplikasi program serta ikut menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa, termasuk desa yang belum diintervensi.

Program desa Pangan Aman membentuk Kader Keamanan Pangan Desa yang memiliki peran memberikan informasi tentang prinsip-prinsip keamanan pangan kepada komunitas masyarakat di desa. Sehingga masyarakat dapat memilih pangan yang aman untuk dikonsumsi dan melaporkan kepada Badan POM apabila ada makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

KASUS GAGAL GINJAL AKUT (GGA)

Kasus gagal ginjal akut (GGA) yang terjadi pada tahun 2022 menyebabkan lebih dari 200 anak di Indonesia meninggal dunia. Diduga kuat kasus tersebut diakibatkan oleh obat sirup yang mengandung cemaran zat kimia di luar ambang batas aman, yakni Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Adapun EG dan DEG merupakan zat kimia berbahaya yang cemarannya dimungkinkan ada di beberapa zat pelarut tambahan dalam obat sirup, termasuk propilen glikol (PG), dengan ambang batas aman 0,1 miligram/mililiter.



BPPM telah melakukan penelusuran berbasis risiko, investigasi, sampling, dan pengujian sampel produk obat sirup dan bahan tambahan yang digunakan yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas. Berdasarkan penelusuran tersebut BPPM menemukan 6 (enam) Industri Farmasi (IF) yang memproduksi sirup obat dengan kadar cemaran EG/DEG yang melebihi ambang batas aman. Ke-enam Industri Farmasi tersebut adalah PT Yarindo Farmatama (PT YF), PT Universal Pharmaceutical Industries (PT UPI), PT Afi Farma (PT AF), PT Ciubros Farma (PT CF), PT Samco Farma (PT SF) dan PT Rama Emerald Multi Sukses (PT REMS).

Menindaklanjuti hasil penelusuran tersebut BPPM telah menetapkan sanksi administratif dengan mencabut sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) cairan oral non-betalaktam, serta diikuti dengan pencabutan seluruh izin edar produk sirup obat Industri Farmasi tersebut. BPPM juga telah memerintahkan kepada ke-enam Industri Farmasi tersebut untuk:

1. Menghentikan kegiatan produksi dan distribusi seluruh sirup obat;
2. Mengembalikan surat persetujuan izin edar semua sirup obat;
3. Menarik dan memastikan semua sirup obat telah dilakukan penarikan dari peredaran, yang meliputi pedagang besar farmasi, apotek, toko obat, dan fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya;
4. Memusnahkan semua persediaan (stock) sirup obat dengan disaksikan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPM dengan membuat Berita Acara Pemusnahan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan perintah penghentian produksi, penarikan, dan pemusnahan sirup obat kepada BPPM.

BBPOM di Mataram sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPM ikut serta melakukan monitoring ke fasilitas pelayanan kefarmasian di Provinsi NTB untuk melakukan pendataan terhadap obat sirup yang mengandung EG dan DEG yang melebihi ambang batas dan memastikan produk tersebut tidak diperjualbelikan serta seluruhnya dilakukan penarikan oleh produsen.

I.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

INTERNAL

1) Anggaran

Sesuai DIPA awal tahun 2023, anggaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB sebesar Rp. 23,995,139,000,- bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2023 SP DIPA-063.01.2.432960/2022.

2) Sumber Daya Manusia

Tabel 1.1 Kebutuhan SDM BBPOM di Mataram Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2023

No.	Jabatan Fungsional/Struktural	Existing	ABK 2022	GAP
1	Jabatan Struktural	2	2	0
2	Jabatan Fungsional Ketata Usahaan	15	31	16
3	Jabatan Fungsional PFM	51	78	27
Total		68	111	43

Per Maret 2023, SDM yang dimiliki BBPOM di Mataram untuk melaksanakan tugas dan fungsi



Pengawasan Obat dan Makanan sejumlah 68 orang dengan proporsi 62% perempuan dan 38% laki-laki. Jumlah SDM tersebut tentunya belum memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB secara optimal.

Berdasarkan analisa beban kerja, untuk mendukung upaya penguatan tugas pokok dan fungsi, BBPOM di Mataram memerlukan SDM sebanyak 111 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 43 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Tingkat pendidikan sebagian besar pegawai BBPOM di Mataram adalah S1 dan Profesi (apoteker). BBPOM di Mataram sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 maupun S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Mataram harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Dengan peningkatan kompetensi SDM, diharapkan BBPOM di Mataram akan mampu menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks dengan semakin berkembang dan beragamnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan.

3) Sarana Prasarana

Kantor BBPOM di Mataram memiliki bangunan Gedung seluas 8.855 m² dengan luas tanah 3.325 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM. BBPOM di Mataram memiliki laboratorium pengujian kimia, dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017.

Selain itu BBPOM di Mataram dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya. Rumah dinas BBPOM di Mataram memiliki bangunan Gedung seluas 200 m² dengan luas tanah 250 m². Dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, BBPOM di Mataram Tahun 2022 telah tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 dari PT. Sucofindo International Certification Services

4) Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BBPOM di Mataram

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh BBPOM di Mataram baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis (ruang lingkup pengujian) serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini BBPOM di Mataram telah memiliki instrumen yang menggunakan teknologi yang kompleks, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS, PCR. Namun pemeliharaan dan kebutuhan operasional untuk instrumen tersebut membutuhkan biaya yang relatif tinggi dan memerlukan kompetensi penguji yang andal dalam menggunakan instrumen tersebut.

Keunggulan laboratorium BBPOM di Mataram :

- Standar Pemenuhan Laboratorium sesuai GLP dengan nilai tertinggi dibanding BB/BPOM lainnya

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

- Laboratorium unggulan pengujian DNA
- Laboratorium utama di NTB untuk pengujian sampel barang bukti narkotika/psikotropika.

EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°5' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur



Gambar 1.4 Peta Wilayah Provinsi NTB

Provinsi NTB terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49 %) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km² (23,51%).

Dinas PMPD DUKCAPIL Provinsi NTB sesuai Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022 mencatat jumlah penduduk NTB sebanyak 5,47 juta jiwa, dengan perbandingan 49,83% jenis kelamin laki-laki dan 50,17% jenis kelamin perempuan.

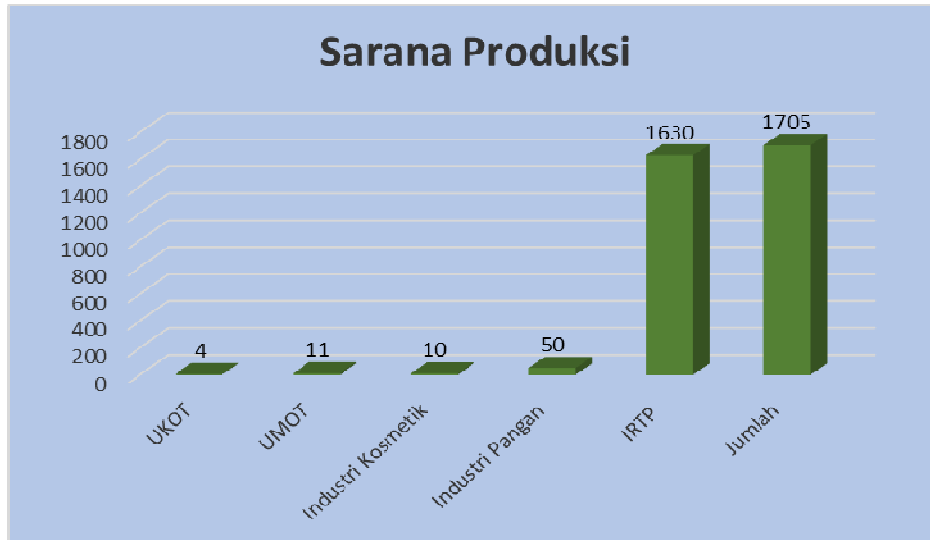
Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi industri kosmetik, industri obat tradisional (IOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT), usaha mikro obat tradisional (UMOT), industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan.

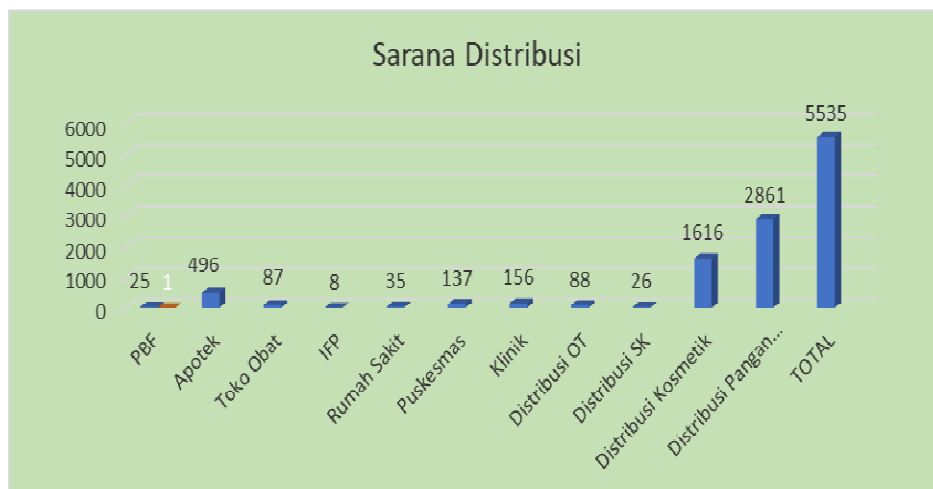
LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana pada gambar 1.5 dan gambar 1.6.



Gambar 1.5 Grafik Sarana Produksi di Wilayah Provinsi NTB Tahun 2023



Gambar 1.6 Grafik Sarana Distribusi di Wilayah Provinsi NTB Tahun 2023

Total terdapat 1705 sarana produksi dan 5535 sarana distribusi di wilayah Kerja BBPOM di Mataram. Sebaran sarana masih terkonsentrasi di Pulau Lombok dan sisanya di Pulau Sumbawa. Dalam pelaksanaan pengawasan, BBPOM di Mataram memanfaatkan sarana transportasi darat, laut dan udara.

Masa tempuh di Pulau Lombok 1 sampai dengan 5 jam. Sedangkan Pulau Sumbawa mencapai 6 – 12 jam, atau menggunakan transportasi udara sekitar 1 jam. Lama proses Pengawasan di Pulau Lombok memerlukan waktu 2 – 3 hari dan Pulau Sumbawa diperlukan waktu 3 - 5 hari.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

II. 1 RENCANA STRATEGIS

Sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian indikator program kerja, BBPOM di Mataram menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Rencana Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2020-2024 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Besar POM di Mataram Nomor HK.07.117.1171.05.20.5465 Tahun 2020. Rencana Strategis 2020-2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta program dan kegiatan yang mengacu kepada Renstra BPOM Tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Mataram sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada tahun 2021 telah dilakukan Reviu Rencana Strategis BBPOM di Mataram yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021. Dalam menentukan indikator program dan kegiatan, BBPOM di Mataram telah mempertimbangkan permasalahan internal dan eksternal, potensi, peluang serta kendala yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mungkin akan terjadi dalam kurun waktu tersebut.

VISI BBPOM DI MATARAM

BBPOM di Mataram dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sejalan dengan visi dan misi Badan POM 2020-2024, yaitu :

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

MISI BBPOM DI MATARAM

Dalam rangka mencapai visi, BBPOM di Mataram menjalankan misi sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Mataram dengan mempertimbangkan tantangan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Berdasarkan reviu Rencana Strategis 2020-2024, BBPOM di Mataram telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

a. SASARAN STRATEGIS-1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI MATARAM

Balai Besar POM di Mataram mengawasi komoditas dengan memiliki risiko tinggi yang mana tidak ada toleransi terhadap standar keamanan, khasiat, dan mutu. Pengawasan harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik, tidak hanya parsial kepada produk yang telah beredar di masyarakat. Seluruh mata rantai pengawasan harus dideteksi secara dini dan diantisipasi sesegera mungkin apabila ditemukan penurunan mutu, produk substandar, dan hal-hal lain yang dapat merugikan masyarakat selaku konsumen.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Mataram merupakan suatu proses komprehensif yang terdiri dari:

- a. Pertama, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar untuk dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Balai Besar POM di Mataram melakukan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka penerbitan surat rekomendasi sebagai kelengkapan untuk memperoleh nomor izin edar produk Obat dan Makanan.

- b. Kedua, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan cara sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dengan terpadu, konsisten, dan terstandar.
- c. Ketiga, pengujian laboratorium. Sampling produk dilaksanakan melalui gabungan antara metode purposive target dengan pendekatan analisis risiko dan acak/random, kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk yang tidak memenuhi syarat.
- d. Keempat, penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan hukum dilaksanakan melalui pemberian sanksi administratif maupun pidana. Pemberian sanksi administratif seperti penarikan dari peredaran, pencabutan izin edar, dan penyitaan untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah dan fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan, sehingga diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 1, maka ditetapkan 4 (empat) indikator beserta target (tabel 2.1).

Tabel 2.1. Indikator dan Target Sasaran Strategis 1

No.	Indikator	Target 2023 (%)
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,00
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00

b. SASARAN STRATEGIS KE-2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI MATARAM

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib

mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BBPOM di Mataram bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Mataram melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target 82,0 pada tahun 2023.**

C. SASARAN STRATEGIS KE-3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI MATARAM

Sebagai UPT BPOM di Provinsi Nusa Tenggara Barat, BBPOM di Mataram berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BBPOM di Mataram, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BBPOM di Mataram bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional khususnya perekonomian di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan yaitu seperti pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Indikator dan Target Sasaran Strategis 3

No.	Indikator	Target 2023
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,80
2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,75
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram	94,00

d. SASARAN STRATEGIS KE-4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI MATARAM

BBPOM di Mataram dituntut untuk mampu mengawal berbagai kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing pelaku usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan pengawalan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU) yaitu seperti pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Indikator dan Target Sasaran Strategis 4

No.	Indikator	Target 2023
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,0
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76,0
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,0
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,0
6	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram	4,40
7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,0

e. SASARAN STRATEGIS KE-5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI MATARAM

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Mataram mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari

kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Mataram, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Mengatasi hal tersebut, pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Mataram mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Mataram perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yaitu seperti pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Indikator dan Target Sasaran Strategis 5

No.	Indikator	Target 2023
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,3
2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84,0
3	Jumlah desa pangan aman	25,0
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8,0

f. SASARAN STRATEGIS KE-6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI MATARAM

BBPOM di Mataram berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. BBPOM di Mataram mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BBPOM di Mataram ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu seperti pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Indikator dan Target Sasaran Strategis 6

No.	Indikator	Target 2023
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,0
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,0

g. SASARAN STRATEGIS KE-7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI MATARAM

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BBPOM di Mataram menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Mataram melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 99,0 di tahun 2023.**

h. SASARAN STRATEGIS KE-8. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR POM DI MATARAM YANG OPTIMAL

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra BPOM 2020-2024, BBPOM di Mataram berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Mataram akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BBPOM di Mataram.

Pada tahun 2020-2024, BBPOM di Mataram berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian supra sistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target

kuantitas dan kualitas SDM di BBPOM di Mataram agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Mataram untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Mataram, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Mataram. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu seperti pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Indikator dan Target Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Target 2023
1	Indeks RB Balai Besar POM di Mataram	89,0
2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram	82,0

i. SASARAN STRATEGIS KE-9. TERWUJUDNYA SDM BALAI BESAR POM DI MATARAM YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram, dengan target 84,0 ditahun 2023.**

j. SASARAN STRATEGIS KE-10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah laboratorium pengujian yang andal yang didukung oleh ketersediaan alat laboratorium serta kompetensi personil laboratorium yang mumpuni. Hal ini dibutuhkan untuk mampu melakukan pengujian terhadap seluruh Obat dan Makanan yang beredar, mengingat semakin banyak dan beragamnya Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan. Selain hal tersebut, aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BBPOM di Mataram pada era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BBPOM di Mataram telah mengaplikasikan berbagai sistem informasi yang telah dikembangkan oleh BPOM. Ke depan BBPOM di Mataram juga perlu mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan yang dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi BPOM.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu seperti pada tabel 2.7.

Tabel 2.7. Indikator dan Target Sasaran Strategis 10

No.	Indikator	Target 2023
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92,0
2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal	2,50

k. SASARAN STRATEGIS KE-11. TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI BESAR POM DI MATARAM SECARA AKUNTABEL

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BBPOM di Mataram dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya seperti pada tabel 2.8.

Tabel 2.8. Indikator dan Target Sasaran Strategis 11

No.	Indikator	Target 2023
1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram	97,0

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 yang mengacu kepada rencana strategis BBPOM di Mataram tahun 2020-2024 telah disusun dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala BBPOM di Mataram Nomor HK.02.02.18A.18A5.07.22.112 tanggal 12 Juli 2022 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2023.

Dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan BBPOM di Mataram tahun 2023 yang mengacu kepada rencana strategis BBPOM di Mataram tahun 2020-2024.

Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2023 memuat penugasan pencapaian target kinerja pada tahun berjalan dari Kepala Badan POM RI kepada Kepala BBPOM di Mataram. Rincian Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,0
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,0
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,0
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,0
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,0
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan	82,0
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,8
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,75
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram	94,0
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,0
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76,0
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,0

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,0
		6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram	4,40
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,0
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,3
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84,0
		3. Jumlah desa pangan aman	25,0
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8,0
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,0
		2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,0
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,0
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Mataram	89,0
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram	82,0
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Mataram	84,0
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92,0
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal	2,50
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram	97,0

Untuk melengkapi evaluasi dan monitoring Perjanjian kinerja pada tahun berjalan, maka dokumen perjanjian kinerja juga dilengkapi dengan rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) tiap triwulan, sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

Tabel 2.10. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,0	90,0	90,0	90,0
		2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,0	84,0	84,0	84,0
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,0	86,0	86,0	86,0
		4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,0	76,0	76,0	76,0
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,0	85,0	85,0	85,0
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	82,0
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	89,8
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	78,75
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram	-	-	-	94,0
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,0	91,0	91,0	91,0
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76,0	76,0	76,0	76,0
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0	100,0	100,0	100,0
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,0	65,0	65,0	65,0
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,0	68,0	68,0	68,0

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
		6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram	-	-	4,40	4,40
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	31	53	74	79,0
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,3	96,3	96,3	96,3
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%	30%	62,5%	84,0
		3. Jumlah desa pangan aman	25%	66%	83%	25,0
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20%	55%	85%	8,0
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	50	70	100,0
		2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	50	70	100,0
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	45	75	99,0
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Mataram	-	-	-	89,0
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram	-	-	-	82,0
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Mataram	-	-	-	84,0
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	92,0
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal	2,50	2,50	2,50	2,50
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram	40	60	70	97,0

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) merupakan nilai rata-rata dari capaian seluruh indikator.

$$NPS = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3}{3}$$

Untuk mengukur penilaian capaian sasaran strategis maupun indikator sasaran strategis digunakan skala penilaian seperti ditunjukkan pada bagan berikut :

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$X < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Mataram adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Mataram yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Mataram menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bagian/fungsi dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Mataram
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data pada *google spreadsheet* secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas, link Capaian RAPK/RHPK BPOM dan pada aplikasi simetris.pom.go.id.
5. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian kinerja Triwulan I ini diukur dengan membandingkan realisasi 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja pada 11 (sebelas) sasaran strategis dengan target Triwulan I pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2023.

Pada Triwulan I tahun 2023, hanya 7 dari 11 sasaran strategis yang dapat dievaluasi karena 4 sasaran strategis lainnya memiliki indikator yang pengukurannya hanya dilakukan di akhir tahun 2023. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sasaran Strategis BBPOM di Mataram

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	93,87	Belum memenuhi ekspektasi
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	79,58	Belum memenuhi ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	104,39	Memenuhi ekspektasi
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	120,0	Memenuhi ekspektasi
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	261,25	Tidak dapat disimpulkan

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang optimal	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal	-	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	100,00	Memenuhi ekspektasi
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel	111,56	Memenuhi ekspektasi

Dari 7 sasaran strategis BBPOM di Mataram yang diukur capaiannya pada triwulan I tahun 2023 diperoleh 4 sasaran strategis dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPS) dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”, 2 sasaran strategis dengan kriteria NPS “belum memenuhi ekspektasi” dan 1 sasaran strategis dengan kriteria NPS “tidak dapat disimpulkan”.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Secara ringkas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Mataram sampai dengan Triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Target, realisasi dan capaian IKU Balai Besar POM di Mataram sampai dengan Triwulan I tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Sampai TW I 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	87,97	97,75
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	71,43	85,03
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	75,00	87,21
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	80,00	105,26
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85	80,00	94,12

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Sampai TW I 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	82	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,8	-	-
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,5	-	-
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	94	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	77,00	84,62
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76	6,82	8,97
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,00	100,00
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	52,00	86,67
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	69,78	102,62
		6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram	4,4	-	-

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Sampai TW I 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	29,33	94,62
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,3	93,95	97,56
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62	20,00	100,00
		3. Jumlah desa pangan aman	25	25,00	100,00
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8	25,00	125,00
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20,17	134,50
		2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20,19	134,62
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99	39,19	261,25
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Mataram	89	-	-
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram	82	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Mataram	84	-	-

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Sampai TW I 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92	-	-
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal	2,5	2,50	100,00
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram	97	61,36	111,56

Dari 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja utama (IKU) hanya 20 indikator kinerja utama dari 7 sasaran strategis yang diukur pencapaiannya pada triwulan 1 tahun 2023. Terdapat 7 indikator yang capaiannya dengan kategori “memenuhi ekspektasi”, 8 indikator dengan kategori “belum memenuhi ekspektasi”, 1 indikator dengan kategori “tidak memenuhi ekspektasi”, serta 4 indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis 1.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja

Balai Besar POM di Mataram

Sasaran Strategis pertama mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis pertama. Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja serta analisis capaian masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 di Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Obat acak MS}}{\text{Total sampel Obat acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- “Obat” mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan obat kuasi.
- “Diperiksa” meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- “Diuji” adalah dilakukan pengujian secara laboratorium sesuai pedoman sampling dan pengujian.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Sedangkan Obat yang Memenuhi Syarat adalah Obat yang evaluasi penandaan memenuhi ketentuan dan pengujian (uji laboratorium) memenuhi syarat. Obat yang hasil evaluasi penandaan tidak memenuhi ketentuan (TMK), tetap dilakukan pengujian laboratorium

sesuai pedoman sampling dan pengujian, tetapi hasil pengujian tidak mempengaruhi keputusan, kesimpulan akhir Obat tidak memenuhi syarat (TMS).

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.3 Target, realisasi dan capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,0	87,97	97,75	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sampai Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target yaitu sebesar 87,97% dari target 90,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 97,75% dengan kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”.

Sampai Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 158 sampel sampel obat, narkotika/psikotropika, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan obat kuasi yang disampling secara random dari 1123 target sampel di Tahun 2023 atau sebesar 14,07%. Diperoleh hasil uji 139 sampel (87,97%) memenuhi syarat (MS) dan 19 sampel (12,03%) tidak memenuhi syarat (TMS).

Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional (OT), suplemen kesehatan (SK) dan kosmetik dengan metode sampling random/acak sampai Triwulan I tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional (OT), suplemen kesehatan (SK), kosmetik dan obat kuasi dengan metode sampling random/acak Triwulan I tahun 2023

Jenis Produk	Sampling		TMK	Jumlah Sampel diuji	Hasil uji		Total TMS	
	Target	Realisasi			TIE/ED/Palsu	MS	TMS	Jumlah
	Obat	354	91	0		57	57	
Obat Tradisional	231	58	0	39	29	10	10	25,64
Obat Kuasi	16	0	0	0	0	0	0	0,00
Suplemen Kesehatan	61	17	0	10	7	3	3	30,00
Kosmetik	461	73	0	52	46	6	6	11,54
TOTAL	1123	239	0	158	139	19	19	12,03

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator persentase Obat yang memenuhi syarat bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 90,0%. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian sampai dengan TW I, persentase Obat yang memenuhi syarat telah tercapai 97,75% sehingga optimis target tahun 2023 dapat tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase Obat memenuhi syarat sampai Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,75%. Relatif rendahnya persentase Obat yang memenuhi syarat menunjukkan kepatuhan produsen dan distributor Obat terhadap ketentuan yang berlaku masih relative rendah.

Agar dapat meningkatkan capaian persentase Obat yang memenuhi syarat, selanjutnya perlu ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Intensifikasi pengawasan *Pre Market* dan *Post Market* guna menjamin produsen dan distributor patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola obat daerah Kabupaten/ Kota, petugas Balai dalam melakukan sampling, pengujian, inspeksi, dan penandaan.
- Koordinasi lintas sektor terus dilaksanakan sehingga pengawasan obat dan makanan dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif

- Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium untuk meningkatkan cakupan pengawasan sehingga sejalan dengan perkembangan teknologi terkini

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Melakukan koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Bidang Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
- Pengawasan penerapan CDOB pada rantai distribusi obat untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat agar tetap terjaga di tangan konsumen dan mencegah penyaluran obat dengan menjaga agar pengadaan obat hanya dari distributor resmi untuk menghindari obat ilegal/palsu ke PBF. Selain itu, penyimpanan obat dapat dikendalikan sehingga stabilitas obat terjaga, dan tidak terjadi penyaluran obat ke jalur ilegal yang memicu penyalahgunaan obat, serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana pelayanan dan distribusi obat tentang Cara Distribusi Obat yang Baik.
- Pengawasan prinsip cara distribusi kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang baik agar tetap terjaga keamanan, mutu, khasiat, termasuk kesesuaian penandaannya. Pengawasan dilakukan baik di tingkat distributor maupun sarana ritel modern dan tradisional.
- Meningkatkan pelaksanaan monitoring Corrective Action Preventive Action (CAPA) dari sarana pelayanan dan distribusi obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Melakukan pengawasan yang disertai dengan law enforcement, dengan melakukan penindakan secara Pro Justitia terhadap peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat.
- Pelaksanaan sampling dan pengujian yang berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram secara rutin di evaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Mataram

b. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pangan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Pangan acak MS}}{\text{Total sampel Pangan acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian laboratorium.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Sedangkan Makanan yang Memenuhi Syarat adalah Makanan yang evaluasi penandaan memenuhi ketentuan dan pengujian (uji laboratorium) memenuhi syarat. Makanan yang hasil evaluasi penandaan tidak memenuhi ketentuan (TMK), tetap dilakukan pengujian laboratorium sesuai pedoman sampling dan pengujian, tetapi hasil pengujian tidak mempengaruhi keputusan, kesimpulan akhir Makanan tidak memenuhi syarat (TMS).

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.5 Target, realisasi dan capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Mataram	Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,00	71,43	85,03	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target yaitu sebesar 71,43% dari target 84,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 85,03% dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”.

Sampai Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 28 sampel makanan yang disampling secara random dari 462 target sampel atau sebesar

6,06% dengan hasil 20 sampel (71,34%) memenuhi syarat (MS) dan 8 sampel (28,57%) tidak memenuhi syarat (TMS). Terdapat 1 sampel kadaluarsa.

Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel makanan dengan metode sampling random/acak sampai Triwulan I tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel makanan dengan metode sampling random/acak Triwulan I tahun 2023

Sampling		TMK		Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS
Target	Realisasi	TIE/Palsu	kedaluarsa		MS	TMS	
462	83	0	0	28	20	8	8

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator makanan yang memenuhi syarat bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 84,0%, sehingga target tahun 2023 baru tercapai sebesar 71,43%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase makanan memenuhi syarat pada Triwulan I tahun 2023 di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 71,43%. Penyebabnya antara lain relatif tingginya TMK Penandaan dan TMS Uji dari produk pangan PIRT yang menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha PIRT masih rendah dalam penerapan *Hygene* Sanitasi dan pemenuhan ketentuan Penandaan/ label.

Agar dapat meningkatkan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat, selanjutnya perlu ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengintensifkan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan menggalang komitmen untuk mengawal pelaksanaan DAK Non Fisik POM sehingga pengawasan obat dan makanan bisa berjalan lebih efektif

- Meningkatkan kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina UMK/pelaku usaha pangan IRT, baik secara mandiri maupun terpadu dalam wadah Tim Koordinasi
- Mengoptimalkan peran petugas penyuluh/pengawas keamanan pangan yang telah mendapatkan pelatihan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan/PKP dan District Food Inspector/ DFI dalam melakukan pembinaan/pengawasan pangan produk IRTP di daerah

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Pengawasan prinsip CPPOB untuk produsen pangan sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.
- Meningkatkan pelaksanaan monitoring Corrective Action Preventive Action (CAPA) kepada distributor dan industri pangan MD sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari besar keagamaan dan intensifikasi pengawasan bahan berbahaya dalam pangan; dan
- Penguatan pengawasan dan pembinaan kepada produsen, khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Kedua hal tersebut dilakukan karena sebagian besar makanan yang TMS diproduksi oleh IRTP dan Produk Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Sehingga diharapkan dengan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus kepada produsen jumlah makanan yang TMS akan semakin menurun di masa yang akan datang.
- Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan DAK non fisik POM untuk pengawasan dan pembinaan industri rumah tangga pangan.

c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat Aman dan Bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Obat targeted MS}}{\text{Total sampel Obat targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan obat kuasi.

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian laboratorium.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Sedangkan Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Obat yang evaluasi penandaan memenuhi ketentuan dan pengujian (uji laboratorium) memenuhi syarat. Obat yang hasil evaluasi penandaan tidak memenuhi ketentuan (TMK), tetap dilakukan pengujian laboratorium sesuai pedoman sampling dan pengujian, tetapi hasil pengujian tidak mempengaruhi keputusan, kesimpulan akhir Obat tidak memenuhi syarat (TMS).

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.7 Target, realisasi dan capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	75,00	87,21	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 75,00% dari target 86,00% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 87,21% dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”.

Sampai Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 68 sampel obat, narkotika/psikotropika, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik hasil sampling secara *targeted* dari 419 target sampel atau sebesar 31,26%. Diperoleh hasil uji 51 sampel (75,00%) memenuhi syarat (MS) dan 17 sampel (25,00%) tidak memenuhi syarat (TMS).

Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional (OT), suplemen kesehatan (SK) dan kosmetik dengan metode sampling *targeted* sampai Triwulan I tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8 Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional (OT), suplemen Kesehatan (SK) dan kosmetik dengan metode sampling *targeted* Triwulan I tahun 2023

Jenis Produk	Sampling		Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji			
	Target	Realisasi		MS		TMS	
				Jumlah	%	Jumlah	%
Obat	85	7	5	5	100,00	0	0,00
Obat Tradisional	99	25	17	11	64,71	6	35,29
Obat Kuasi	7	0	0	0	0,00	0	0,00
Suplemen Kesehatan	26	9	8	8	100,00	0	0,00
Kosmetik	198	90	38	27	71,05	11	28,95
Rokok	4	0	0	0	0,00	0	0,00
TOTAL	419	131	68	51	75,00	17	25,00

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 86,0%. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian Triwulan I, maka persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum mencapai target tahun 2023 atau baru tercapai sebesar 87,21%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 75,00% sehingga tercapai sebesar 87,21% dari target 86,0%. Masih rendahnya persentase Obat yang memenuhi syarat menunjukkan rendahnya kepatuhan produsen dan distributor Obat terhadap ketentuan yang berlaku.

Agar dapat meningkatkan capaian persentase obat yang aman dan bermutu, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Intensifikasi pengawasan *Pre Market* dan *Post Market* guna menjamin produsen dan distributor patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola obat daerah Kabupaten/ Kota, petugas Balai dalam melakukan Sampling, Pengujian, Inspeksi, dan Penandaan.
- Koordinasi lintas sektor terus dilaksanakan sehingga pengawasan obat dan makanan dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif
- Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium untuk meningkatkan cakupan pengawasan sehingga sejalan dengan perkembangan teknologi terkini

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- Melakukan koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Bidang Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
- Pengawasan penerapan CDOB pada rantai distribusi obat untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat agar tetap terjaga di tangan konsumen dan mencegah penyaluran obat dengan menjaga agar pengadaan obat hanya dari distributor resmi untuk menghindari obat ilegal/palsu ke PBF. Selain itu, penyimpanan obat dapat dikendalikan sehingga stabilitas obat terjaga, dan tidak terjadi penyaluran obat ke jalur ilegal yang memicu penyalahgunaan obat, serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana pelayanan dan distribusi obat tentang Cara Distribusi Obat yang Baik.

- Pengawasan prinsip cara distribusi kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang baik agar tetap terjaga keamanan, mutu, khasiat, termasuk kesesuaian penandaannya. Pengawasan dilakukan baik di tingkat distributor maupun sarana ritel modern dan tradisional.
- Meningkatkan pelaksanaan monitoring Corrective Action Preventive Action (CAPA) dari sarana pelayanan dan distribusi obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Melakukan pengawasan yang disertai dengan law enforcement, dengan melakukan penindakan secara Pro Justitia terhadap peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat.
- Pelaksanaan sampling dan pengujian yang berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram secara rutin di evaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Mataram

d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

% Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* MS dibagi total sampel Makanan *targeted* yang diuji) x 100%

Keterangan:

Diuji meliputi pengujian laboratorium.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Sedangkan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan adalah Pangan atau Kemasan Pangan yang dilakukan pengujian (uji laboratorium) sesuai parameter uji wajib dalam pedoman sampling dan pengujian dengan hasil memenuhi syarat.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.9.Target, realisasi dan capaian Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00	80,00	105,26	Memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 80,00% dari target 76,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 105,26% dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”.

Sampai Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 20 sampel makanan hasil sampling secara “targeted” dengan hasil 16 sampel (14,68%) memenuhi syarat (MS) dan 4 sampel (20,00%) tidak memenuhi syarat (TMS).

Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel makanan dengan metode sampling targeted sampai Triwulan I tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini :

Tabel 3.10.Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel makanan dengan metode sampling targeted pada Triwulan I tahun 2023

Sampling		Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS
Target	Realisasi		MS	TMS	
109	22	20	16	4	4

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 76,0%. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian sampai Triwulan I, maka persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah mencapai target tahun 2023 atau tercapai sebesar 105,26%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu sampai Triwulan I tahun 2023 yang tinggi (105,26%) disebabkan antara lain relatif tingginya kepatuhan produsen dan distributor makanan terhadap ketentuan yang berlaku, hal itu didukung oleh adanya intervensi pengawasan distributor makanan yang dilakukan secara optimal yaitu dengan pendekatan kepada pelaku usaha dalam berbagai kesempatan antara lain pada saat pengawasan dan pertemuan dengan pelaku usaha.

Agar dapat terus meningkatkan capaian persentase makanan aman dan bermutu, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengintensifkan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan menggalang komitmen untuk mengawal pelaksanaan DAK Non Fisik POM sehingga pengawasan obat dan makanan bisa berjalan lebih efektif
- Meningkatkan kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina UMK/pelaku usaha pangan IRT , baik secara mandiri maupun terpadu dalam wadah Tim Koordinasi
- Mengoptimalkan peran petugas penyuluh/pengawas keamanan pangan yang telah mendapatkan pelatihan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan/PKP dan District Food Inspector/ DFI dalam melakukan pembinaan/pengawasan pangan produk IRT di daerah
- Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota guna pemanfaatan laboratorium kesehatan (Labkesda) untuk melakukan pemeriksaan terhadap makanan terutama terhadap parameter bahan berbahaya dalam pangan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pengawasan prinsip CPPOB untuk produsen pangan khususnya IRTP sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.
- b. Meningkatkan pelaksanaan monitoring Corrective Action Preventive Action (CAPA) kepada industri pangan MD dan juga distributor pangan

- c. Pelaksanaan sampling dan pengujian yang berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023.
- d. Intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari besar keagamaan dan intensifikasi pengawasan bahan berbahaya dalam pangan.
- e. Adanya inovasi Gemilang Pro UMKM yaitu Pendampingan langsung oleh petugas petugas BBPOM di Mataram secara Intensif dan Proaktif kepada pelaku usaha olahan pangan yang berkomitmen yang dilakukan secara daring dan luring dalam proses pendaftaran produk.

e. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat} = (\text{Jumlah sampel Pangan Fortifikasi MS} / \text{total sampel Pangan Fortifikasi yang diuji}) \times 100\%$$

Keterangan:

Diuji meliputi pengujian laboratorium.

Kriteria Pangan Fortifikasi Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat parameter fortifikan berdasarkan pengujian.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.11. Target, realisasi dan capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	85,00	80,00	94,12	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat sampai Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 80,0% dari target 85,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 94,12% dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”.

Sampai Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan sampling dan pengujian terhadap 75 sampel pangan fortifikasi dari 107 target sampel atau sebesar 70,09% dengan hasil 60 sampel (80,0%) memenuhi syarat (MS) dan 15 sampel (20,0%) tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.12 Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada Triwulan I tahun 2023

Sampling		Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS
Target	Realisasi		MS	TMS	
107	75	75	60	15	15

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat bersifat flat dengan target tahunan dan target triwulan sama yaitu 85,0%. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian sampai Triwulan I, maka persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat belum mencapai target tahun 2023 atau baru tercapai sebesar 94,12%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat sampai Triwulan I tahun 2023 yang tidak mencapai target disebabkan cukup tingginya sampel garam beryodium produksi local NTB yang TMS uji. Hal ini menunjukkan kepatuhan produsen yang relative rendah terhadap ketentuan yang berlaku.

Agar dapat terus meningkatkan capaian persentase makanan aman dan bermutu, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan menggalang komitmen stakeholder agar pengawasan obat dan makanan bisa berjalan lebih efektif
- Melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina pelaku usaha yang memproduksi pangan fortifikasi

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

- a. Bimbingan teknis penerapan CPPOB bagi produsen pangan fortifikasi sehingga mampu menghasilkan produk pangan fortifikasi yang aman dan bermutu.

- b. Meningkatkan pelaksanaan monitoring Corrective Action Preventive Action (CAPA) kepada distributor dan industri pangan fortifikasi sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- c. Pelaksanaan sampling dan pengujian yang berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023.
- d. Intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari besar keagamaan
- e. Pendampingan sertifikasi melalui inovasi JELITA (Jemput Layanan Ditempat) yaitu Pendampingan langsung oleh petugas BBPOM di Mataram secara Intensif dan Proaktif kepada pelaku usaha olahan pangan yang berkomitmen yang dilakukan secara daring dan luring dalam proses pendaftaran produk.

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis kedua hanya berasal dari satu indikator, yaitu **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram.**

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan. Nilai indikator ini diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

Nilai Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu akan diukur capaiannya pada triwulan IV tahun 2023 dengan target 82,0.

- Konsep pengukuran indeks yaitu:
 - a. Kesadaran (Awareness), bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “pengetahuan” dari masyarakat.

- b. Ketertarikan (Interest), bertujuan untuk menggali ketertarikan masyarakat untuk tahu dan mempelajari tentang keamanan produk. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “sikap” dari masyarakat
- c. Keinginan (Desire), bertujuan untuk menggali keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “sikap” dari masyarakat.
- d. Tindakan (Action, bertujuan untuk menggali tindakan masyarakat saat memilih dan mengkonsumsi produk Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “perilaku” dari masyarakat.

Nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan makanan yang aman dan bermutu diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan tahun 2023 dengan metodologi survei menggunakan *Quantitative Research* dengan perhitungan kerangka sampel menggunakan *margin of error* (MoE 10%), dan pengumpulan data dengan teknik wawancara tatap muka terhadap target responden berusia 17-65 tahun berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga (DSRT) dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta pencacahan dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik interview terhadap responden dengan pemanfaatan teknologi informasi. Komponen yang dinilai pada indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku.



Gambar 3.1 Indikator Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat

Sasaran Strategis 3.

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 3 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pencapaian sasaran strategis ketiga ini yaitu :

Tabel 3.13 Indikator dan target kinerja pencapaian sasaran strategis ketiga

Indikator Kinerja	Target 2023
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,80
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,50
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram	94,00

Pengukuran capaian ketiga indikator kinerja di sasaran strategis keempat ini dilakukan di triwulan 4 / akhir tahun 2023.

a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan mencakup desk, bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan (RS, puskesmas, apotek dll). Aspek pengukuran dalam survey ini adalah: a. Aspek *Tangible* (T) b. Aspek *Reliability* (R) c. Aspek *Assurance* (A) d. Aspek *Responsiveness* (Re) e. Aspek *Empathy* (E).

Nilai indeks ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan tahun 2023 secara online menggunakan aplikasi yang terhubung dengan BPOM Operation Center (BOC).

b. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles). Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness) , memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Nilai indeks ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan tahun 2023 oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan metodologi survei menggunakan Quantitative Research, potong lintang (cross-sectional) dengan perhitungan kerangka sampel menggunakan margin of error (MoE 10%), dan pengumpulan data dengan wawancara tatap muka.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang

disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat pada BBPOM di Mataram dilakukan terhadap 2 jenis layanan yaitu layanan pengujian dan layanan informasi dan pengaduan.

Sasaran Strategis 4.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 6 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis keempat ini. Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja serta analisis capaian masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4 pada Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.14 Target, realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	77,00	84,62	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Mataram diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%.

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target yaitu sebesar 77,00% dari target 91,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 84,62% dengan kriteria "belum memenuhi ekspektasi".

Rincian tindak lanjut hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan berdasarkan jenis keputusan/rekomendasi dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.15 Rincian tindak lanjut hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan berdasarkan jenis keputusan/rekomendasi

No	Jenis Keputusan/Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindaklanjut
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	52	52 100,00%
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	17	14 82,35%
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	37	18 48,65%
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	0	0 0,00%
TOTAL		106	84 77,00%

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 91,0%. Berdasarkan hasil realisasi Triwulan I, maka persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan belum mencapai target tahun 2023 atau baru tercapai sebesar 84,62%..

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian sampai Triwulan I tahun 2023 indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”. Hal ini disebabkan karena masih relative rendah/lambat tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BPOM pusat terhadap rekomendasi yang diberikan.

Agar dapat meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap tindaklanjut dan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi yang dilaksanakan.
2. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait baik di BPOM Pusat atau UPT lain untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan baik secara formal maupun informal agar dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah diterbitkan oleh BBPPOM di Mataram.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Pusat atau UPT lainnya baik formal maupun non formal.
2. Pemeriksaan Sarana Produksi/ Distribusi/ Pelayanan Obat dan makanan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi yang diterima.
3. Pemantauan produk Obat dan Makanan melalui sampling, pengawasan penandaan, pengawasan periklanan dan pemantauan produk recall.
4. Peningkatan kompetensi teknis maupun non teknis bagi petugas.

b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai Triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.16 di bawah ini.

Tabel 3.16 Target, realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76	6,82	8,97	Tidak memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari perhitungan:

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan} = (A + B) / 2$$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Tindak lanjut merupakan *feedback/respon* dari pelaku usaha atau instansi terkait, terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Mataram atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Badan POM, terkait hasil pengawasan yang dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan tindak lanjut kasus.

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 6,82% dari target 76% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 8,97% dengan kriteria “**sangat rendah**”.

Jumlah *feedback* tindak lanjut yang diterima Balai Besar POM di Mataram sampai Triwulan I tahun 2023 sebanyak 22 dari 31 rekomendasi yang dikeluarkan. Sebagian besar tindak lanjut yang diperoleh, berasal dari pelaku usaha yaitu sebanyak 3 tindaklanjut/feedback, sedangkan belum ada feedback yang berasal dari lintas sektor terkait.

Rincian tindaklanjut hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan berdasarkan jenis keputusan/rekomendasi sampai Triwulan I dapat dilihat pada tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3.17. Rincian tindak lanjut hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan berdasarkan jenis keputusan/rekomendasi

No	Jenis Keputusan/Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindaklanjut
1	keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	22	3 13,64%
2	keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	9	0 0,00%
TOTAL		31	3 6,82%

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 76%. Berdasarkan hasil realisasi sampai Triwulan I tahun 2023, target akhir tahun 2023 baru tercapai sebesar 8,97%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

sampai Triwulan I tahun 2023 indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan masih jauh dari target yang ditetapkan dengan capaian 8,97% atau dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi”. Hal ini disebabkan antara lain karena masih rendahnya komitmen pelaku usaha dan pemerintah

kabupaten/kota untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BBPOM di Mataram.

Agar dapat meningkatkan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi CAPA secara berkala
2. Koordinasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor lebih diintensifkan baik secara daring maupun pertemuan secara langsung.
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SMART POM dalam upaya peningkatan tindak lanjut oleh pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram.
4. Membuat inovasi untuk mengakomodir monitoring dan evaluasi CAPA bagi pelaku usaha

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pembimbingan dan pengawalan terkait penyusunan rencana dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik pengawasan Obat dan makanan Kabupaten/Kota
2. Komunikasi dan koordinasi intensif dengan lintas sektor terkait guna menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Obat dan makanan baik secara luring maupun daring
3. Desk CAPA dengan pelaku usaha

c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Capaian indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai Triwulan I tahun 2023 sebesar 100,00% dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”. Rincian capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Mataram	100,0	100,0	100,0	Memenuhi ekspektasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}) \times 100\%$

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Jumlah keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu seperti dalam rincian tabel 3.19.

Tabel 3.19 Jumlah keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I Tahun 2023

No	Jenis Keputusan Sertifikasi	Jumlah Permohonan	Jumlah Keputusan Sertifikasi Tepat Waktu	% sertifikasi tepat waktu
1	Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB	2	2	100,00
2	Rekomendasi/ Keputusan Pemenuhan CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	9	9	100,00
3	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	233	233	100,00
TOTAL		242	242	100,00

Dari tabel diatas, keputusan sertifikasi didominasi oleh layanan pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 233 sertifikat (96,28%) dan sisanya 9 rekomendasi (3,71%) adalah layanan sertifikasi.

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 100,0%. Berdasarkan hasil realisasi sampai Triwulan I tahun 2023, target akhir tahun 2023 telah tercapai 100,0%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target yaitu sebesar 100,0% . Hal ini disebabkan karena seluruh permohonan yang diterima baik dari pengujian sampel pihak ketiga maupun sertifikasi seluruhnya telah diselesaikan tepat waktu.

Agar dapat meningkatkan capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

1. BBPOM di Mataram meningkatkan materi Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan yang benar-benar berdampak secara langsung terhadap percepatan pemenuhan kebutuhan perizinan/sertifikasi dari pelaku usaha.
2. Membuat atau mengembangkan inovasi percepatan pelayanan perijinan/ sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Bimbingan teknis terkait CDOB, CPKB, dan CPOTB terhadap pelaku usaha
2. Layanan konsultasi 24 jam bagi pelaku usaha yang akan mengajukan izin edar baik secara daring maupun luring
3. Kemudahan-kemudahan bagi UMKM antara lain penyederhanaan persyaratan dan keringanan biaya pengujian
4. Peningkatan kompetensi petugas layanan penerima sampel pihak ketiga, petugas sertifikasi dan personil pengujian sampel pihak ketiga

d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan Memenuhi Ketentuan} = (\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} / \text{Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}) \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Rincian Target, realisasi dan capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai Triwulan I dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20 Target, realisasi dan capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	52,00	80,0	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target yaitu sebesar 52,00% dari target 60,00% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 80,0% dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”.

Sarana produksi Obat dan Makanan yang ada diwilayah Nusa Tenggara Barat meliputi sarana produksi obat tradisional (UKOT dan UMOT), kosmetik (industri kosmetik golongan A dan B), industri pangan olahan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Pemeriksaan sarana produksi bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Cara Produksi yang Baik guna menjamin mutu, keamanan dan khasiat/manfaat produk yang dihasilkan.

Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis resiko, dimana sarana yang menjadi target pemeriksaan diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat / track record tidak memenuhi ketentuan, sarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan serta sarana baru. Sampai Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sebanyak 25 sarana dengan hasil 13 sarana (52,00%) MK dan 12 sarana (48,00%) TMK. Rincian hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.21 Rincian hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan

No.	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	UKOT	0	0	0
2	UMOT	0	0	0
3	Industri Kosmetik	1	1	0
4	Industri Pangan	12	5	7
5	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	12	7	5
TOTAL		25	13	12

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 65,0%. Berdasarkan hasil realisasi sampai Triwulan I tahun 2023, target akhir tahun 2023 baru tercapai sebesar 80,0% sehingga dibutuhkan pengawalan yang ketat agar target tahun 2023 dapat tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I tahun 2023 masih jauh dari target. Hal ini disebabkan karena kepatuhan produsen Obat dan makanan terhadap peraturan perundang-undangan masih rendah terutama industry pangan industri rumah tangga pangan (IRTP) karena sebagian besar yang TMK berasal dari sarana industri pangan dan IRTP.

Agar dapat meningkatkan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembinaan dan intervensi secara terus menerus dan berkelanjutan yang dilakukan terhadap pelaku usaha dan sarana tentang penerapan cara produksi yang baik serta pemberian sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku kepada pelaku usaha yang produknya berizin edar Badan POM.
2. Melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dalam melakukan pengawalan hasil pengawasan obat dan makanan sesuai amanat Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Memberikan layanan konsultasi *online* dan tersedianya ruang khusus layanan konsultasi dengan petugas yang kompeten dalam memberikan pendampingan bagi pelaku usaha

e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

% Sarana distribusi Obat dan Makanan MS = (Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / Target Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Keterangan:

Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa sama dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Tabel 3.22 Target, realisasi dan capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,0	69,78	102,62	Memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 69,78% dari target 68,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 102,62% dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”.

Pemeriksaan sarana distribusi bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Cara Distribusi yang Baik guna menjamin mutu, keamanan dan khasiat/manfaat produk Obat dan Makanan yang didistribusikan/dijual.

Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis resiko, yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat / *track record* tidak memenuhi ketentuan, sarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan serta sarana baru. Sampai Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sebanyak 139 sarana dengan hasil 97 sarana (69,78%) MK dan 42 sarana (30,22%) TMK. Rincian hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan dapat dilihat pada tabel 3.23 di bawah ini.

Tabel 3.23 Rincian hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	PBF	3	3	0
2	Apotek	19	10	9
3	Toko Obat	5	4	1
4	IFK/IFRS	2	2	0
5	Rumah Sakit	5	3	2
6	Puskesmas	8	7	1
7	Klinik	10	8	2
8	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	2	0	2
9	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Kosmetik	24	9	15
11	Sarana Peredaran Pangan Olahan	61	51	10
TOTAL		139	97	42

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 68,0%. Berdasarkan hasil realisasi Triwulan I tahun 2023, target akhir tahun 2023 telah tercapai sebesar 102,62%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang cukup tinggi antara lain disebabkan cukup tingginya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya di sarana puskesmas, fasilitas distribusi obat tradisional, fasilitas distribusi kosmetik dan fasilitas distribusi pangan olahan.

Agar dapat terus meningkatkan Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha serta penerapan sanksi baik administrasi maupun *projustisia* sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan;
- Peningkatan kompetensi Inspektur melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang
- Bimbingan teknis tentang cara distribusi yang baik bagi pelaku usaha guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sarana/pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Asistensi Kepada Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan dana alokasi khusus untuk meningkatkan pengawasan sarana distribusi/ pelayanan kefarmasian
- Mendorong pelaku usaha untuk melakukan *self assesment* guna memastikan kepatuhan terhadap Undang - Undang.

f. Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi :

- Kebijakan pelayanan (30%)
- Profesionalitas SDM (18%)
- Sarana prasarana (15%)
- Sistem informasi pelayanan publik (15%)
- Konsultasi dan pengaduan (15%)
- Inovasi (7%)

Penilaian kinerja UPP mengacu Permen PANRB nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Nilai Indeks pelayanan publik diperoleh dari penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)

Nilai Indeks pelayanan publik (IPP) tahun 2023 akan diukur capaiannya pada triwulan I tahun 2023 dengan target 4,40.

g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sampai Triwulan I tahun 2023 sebesar 94,62% dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”. Rincian capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.24 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Mataram	31,0	29,33	94,62	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diperoleh dari nilai rata-rata progress kegiatan pendampingan UMKM obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan yang dilakukan.

Tabel 3.25 Realisasi UMKM yang memenuhi standar produksi berdasarkan Jenis Komoditi Triwulan I Tahun 2023

No	Jenis Komoditi	Bobot nilai (%)	Progres UMKM yang memenuhi standar (%)	Jumlah UMKM yang MS	Jumlah UMKM yang didampingi	% UMKM yang MS
1	Obat tradisional	100	40	1	2	50,00
2	Kosmetik	100	24	0	5	0,00
3	Pangan	100	5	0	21	0,00
TOTAL		100	29,33	1,00	28,00	16,67

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik bersifat kumulatif. Berdasarkan hasil realisasi sampai Triwulan I tahun 2023, target akhir tahun 2023 baru tercapai 29,33%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik belum mencapai target triwulan I yaitu sebesar 94,62% . Hal ini disebabkan karena tahapan pendampingan untuk fasilitasi pemenuhan persyaratan untuk komoditi obat tradisional dan kosmetik tidak terlaksana dengan baik.

Agar dapat meningkatkan capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendampingan UMKM secara intensif baik secara *offline* maupun secara *online*
2. Membuat atau mengembangkan inovasi pendampingan UMKM

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan pendampingan teknis terhadap pelaku usaha UMKM baik secara *offline* maupun *online*
2. Layanan konsultasi 24 jam bagi pelaku usaha yang akan mengajukan izin edar baik secara daring maupun luring
3. Peningkatan kompetensi petugas yang melaksanakan pendampingan kepada UMKM.

Sasaran Strategis 5.

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram

Terdapat 4 Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis kelima yaitu tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, jumlah desa pangan aman serta jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan BBPOM di Mataram melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Tingkat Efektivitas KIE sampai Triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.26 Target, Realisasi dan Capaian Indikator kinerja tingkat efektivitas KIE

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,30	93,95	97,56	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sampai Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 93,95 dari target 96,30 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 97,56% dengan kriteria “ belum memenuhi ekspektasi”.

Realisasi ini diperoleh dari hasil survey terhadap 87 orang responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BBPOM di Mataram sampai Triwulan I tahun 2023.

Hasil survey diperoleh dari Biro Hukum dan Organisasi BPOM selaku pihak yang mengolah data hasil survey.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Mataram melalui kegiatan KIE (Komunikasi,

Informasi, dan Edukasi) yang dilakukan melalui (i) media cetak dan elektronik; (ii) KIE langsung ke masyarakat; dan (iii) melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (i) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (ii) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (iii) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (iv)Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BBPOM di Mataram sampai Triwulan I tahun 2023. Teknik survei dapat berupa *face to face* interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Tabel 3.27 Nilai Masing-masing Parameter Penyusun Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

No	Kriteria	Nilai Indeks	
		Skala 100	Skala 4
1	Ragam Kegiatan	94,76	3,79
2	Pemahaman	94,31	3,77
3	Manfaat	96,6	3,86
4	Minat	85,92	3,44
Total Indeks		93,95	3,76

Perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan bersifat flat, dengan kata lain target tahunan dan target tiap triwulan sama yaitu 96,30%. Berdasarkan hasil realisasi Triwulan II tahun 2023, target akhir tahun 2023 baru tercapai sebesar 97,56%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Capaian indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan belum mencapai target disebabkan karena nilai parameter minat relatif rendah dibanding parameter lainnya. Hal tersebut menunjukkan perlu dilakukan terobosan dan inovasi KIE berkelanjutan yang dapat meningkatkan minat masyarakat melalui ragam kegiatan dan media sesuai karakteristik dan kebutuhan informasi audiens target. Belum adanya evaluasi terhadap konten materi dan konsep kegiatan KIE yang diselenggarakan. Belum terlalu relevannya konten materi KIE dengan isu obat dan makanan terkini serta belum mempertimbangkan budaya dan bahasa yang mudah dipahami, perlu mendapat perhatian untuk peningkatan minat masyarakat.

Agar dapat meningkatkan capaian Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, perlu dilakukan kerjasama dengan *content creator* lokal dalam rangka meningkatkan minat peserta KIE.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

KIE yang telah dilakukan BBPOM di Mataram sampai TW2 Tahun 2023 yaitu Pameran 2 kali, Penyebaran Informasi/Sosialisasi 1 kali dan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) sebanyak 36 kali. Selain itu dilakukan juga penyebaran informasi melalui media sosial, media luar ruang dan media cetak.

b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman**Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya akan dicapai pada akhir tahun 2023 dengan target 62 sekolah. Pada Triwulan I tahun 2023 yang ditargetkan dan diukur berupa *progress* pencapaian indikator.

Realisasi dan capaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman sampai Triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.28 Target dan realisasi serta capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20%	20%	100,0%	Memenuhi ekspektasi

Realisasi *progress* jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman sampai Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 20% dari target 20% sekolah, sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100,0% dengan kriteria "memenuhi ekspektasi".

Rincian pembobotan progress dan realisasi progress jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman pada Triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.29 Realisasi progress jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

No	Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Realisasi (%)
1	Advokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20	20
2	Sosialisasi keamanan pangan	10	-
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15	-
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10	-
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah		-
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5	-
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10	-
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20	-
7	Pengawasan	10	-
TOTAL (%)		100	20,0

Progress realisasi ini diperoleh dari 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2021 yaitu Advokasi lintas sektor PJAS dengan bobot 20%.

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target *progress* indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman pada akhir tahun 2023 sebesar 100% (84 sekolah). Berdasarkan hasil realisasi Triwulan I tahun 2023, target akhir tahun 2023 telah tercapai sebesar 20,0%, sehingga diprediksi target akhir tahun 2023 dapat tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berikut hal yang menyebabkan keberhasilan realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman:

1. Pelaksanaan tahap kegiatan sesuai dengan perencanaan
2. Koordinasi melalui Whatsapp Group Kader Keamanan Pangan Sekolah sangat memudahkan pemantauan kegiatan Intervensi Keamanan Pangan yang dilakukan secara mandiri oleh Kader.
3. Pengumpulan dokumentasi dan bukti kegiatan Intervensi Keamanan Pangan juga diunggah melauai Google Drive sehingga pemantauan lebih mudah dilaksanakan.

Agar capaian jumlah sekolah dengan PJAS aman dapat ditingkatkan pada periode berikutnya, rekomendasi yang perlu dilakukan adalah:

- Bersinergi dengan lintas sektor terkait yang memiliki program sejenis yaitu: Dinas Kesehatan Kota/Kab dengan Program Kantin Sekolah Sehat dan Dinas Pendidikan dengan Program Sekolah Sehat dan Sekolah Ramah Anak. Sehingga memiliki luaran yang sama untuk semua Dinas yang terkait.
- Pendampingan dari lintas sektor terkait, antara lain Dinas Pendidikan Provinsi NTB, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Kemenag Kota Mataram, Kemenag Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kesehatan Kota Mataram dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang tercapainya indikator kinerja ini adalah Advokasi Lintas Sektor keamanan PJAS yang dilaksanakan sesuai target/perencanaan.

c. Jumlah Desa Pangan Aman

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

indikator Jumlah desa pangan aman akan dicapai pada akhir tahun 2023 dengan target 18 desa. Pada Triwulan I tahun 2023 yang ditargetkan dan diukur berupa *progress* pencapaian indikator.

Realisasi dan capaian indikator Jumlah desa pangan aman sampai Triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.30 Target dan progress realisasi Jumlah desa pangan aman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25%	25%	100%	Memenuhi ekspektasi

Realisasi *progress* Jumlah desa pangan aman sampai Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 25% dari target progress 25%, sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 100% dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”.

Rincian pembobotan progress dan realisasi progress Jumlah desa pangan aman sampai Triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.31 Realisasi progress Jumlah desa pangan aman

No	Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Realisasi (%)
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20	20
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5	5
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15	-
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15	-
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10	-
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10	-
7	Monitoring dan Evaluasi	10	-
8	Lomba Desa Pangan Aman	5	-
8	Pengawalan tahun sebelumnya	10	-
TOTAL (%)		100	25

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target *progress* indikator Jumlah desa pangan aman pada akhir tahun 2023 sebesar 100% (18 desa). Berdasarkan hasil realisasi Triwulan I tahun 2023, target akhir tahun 2023 telah tercapai sebesar 25,0%, sehingga diprediksi target akhir tahun 2023 dapat tercapai.

Analisis penyebab peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Progress indikator Jumlah desa pangan aman pada Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target disebabkan seluruh kegiatan yang ditargetkan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan antara advokasi kelembagaan desa dan pengadaan paket informasi keamanan pangan/rapid tes kit.

Agar dapat terus meningkatkan keberhasilan program Desa Pangan Aman, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasi dan mengimplementasikan program Desa Pangan Aman secara mandiri
- Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman untuk mengatasi kendala jarak dan SDM
- Menyesuaikan bentuk penyampaian materi keamanan pangan agar lebih mudah dipahami dan dipraktekkan oleh kader dan komunitas
- Pengawasan terhadap desa yang sudah diintervensi agar terus menjalankan program Desa Pangan Aman secara mandiri
- Koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan sinkronisasi kegiatan di Desa, seperti program Kampung KB (BKKBN), Kampung Sehat (POLRI), dan Desa Bersinar (BNN).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Beberapa program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang tercapainya indikator kinerja ini adalah Advokasi kelembagaan Desa dan pengadaan paket informasi keamanan pangan/rapid tes kit .

Advokasi Kelembagaan Desa, yaitu dengan koordinasi dengan lintas sektor dan perangkat desa untuk menggalang komitmen dalam mengimplementasikan kegiatan desa pangan aman secara terpadu, memetakan program dan kegiatan lintas sektor yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan program Desa Pangan Aman serta menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman.

d. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas akan dicapai pada akhir tahun 2023 dengan target 8 pasar. Pada Triwulan I tahun 2023 yang ditargetkan dan diukur berupa *progress* pencapaian indikator.

Realisasi dan capaian indikator ini sampai Triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.32 Target dan Progres Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20%	25%	125,00%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi *progress* Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sampai Triwulan I tahun 2023 belum mencapai target yaitu sebesar 25% dari target 20%, sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 125,00% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”.

Rincian pembobotan progress dan realisasi progress Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sampai Triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.33 Realisasi progress Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

No	Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Realisasi (%)
1	Advokasi	20	20
2	Survei Pasar	5	5
3	Bimtek Pengelola Pasar	15	-
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15	-
5	Penyuluhan	10	-
6	Kampanye	10	-
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15	-
8	Pengawasan	10	-
TOTAL (%)		100	25

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target *progress* indikator jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya pada akhir tahun 2023 sebesar 125,00% (8 pasar). Berdasarkan hasil realisasi sampai Triwulan I tahun 2023, target akhir tahun 2023 telah tercapai sebesar 25,0%, sehingga optimis target akhir tahun 2023 dapat tercapai.

Analisis penyebab peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Progress indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sampai triwulan I tahun 2023 telah mencapai target disebabkan kesalahan penetapan target *progress* triwulan I yang masih menggunakan *tolls* tahun sebelumnya.

Peran aktif dan komitmen Pemerintah Daerah terutama Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota dalam Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya sangat mempengaruhi terlaksananya program intervensi ini. Bimtek Pengelola pasar oleh petugas BBPOM di Mataram dan pengujian sampel yang dilakukan secara mandiri oleh Petugas Pasar terus dilakukan untuk memastikan validitas terhadap hasil uji yang dilakukan, terutama untuk sampel-sampel yang menunjukkan hasil uji positif mengandung bahan berbahaya.

Agar dapat terus meningkatkan keberhasilan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasi dan mengimplementasikan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya secara mandiri
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya untuk mengatasi kendala jarak dan SDM
3. BBPOM di Mataram meningkatkan materi Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan yang benar-benar berdampak secara langsung terhadap keamanan pasar dari bahan berbahaya.
4. Koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan sinkronisasi kegiatan di Desa, seperti program Pasar Sehat (Dinas Kesehatan).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Advokasi untuk membangun komitmen pemangku kepentingan
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan komitmen dan meningkatkan koordinasi secara sinergi dan berkelanjutan dari Pemerintah Daerah.
2. Survei pasar
Pada kegiatan ini ujian dilaksanakan identifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya;

dan mengidentifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.

Sasaran Strategis 6.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 2 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis keenam ini. Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja serta analisis capaian masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 6 sampai Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebagai berikut:

Tabel 3.34 Target, realisasi dan capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	20,17	134,50	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 20,17% dari target 15,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 134,50% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari perhitungan:

$$\% \text{ Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

$$B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi;

Sampel Obat yang diperiksa meliputi pemeriksaan sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area

Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Tabel 3.35 Rincian realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I tahun 2023

Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	% diperiksa dan diuji sesuai standar
1542	370	1871	306	20,17

Sampai Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan sesuai standar sejumlah 370 sampel dari 1542 target produk (23,99%). Telah diuji sesuai standar sejumlah 306 sampel (20,78%) dari total 1871 sampel yang telah selesai diuji.

Dalam rangka melindungi masyarakat NTB dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BBPOM Mataram melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang beredar. Pelaksanaan sampling mengacu kepada SK Kepala Badan POM RI tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023, sampling dilakukan di sarana produksi dan distribusi Obat, pelayanan kesehatan dan secara online khusus untuk sampel kosmetik.

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada akhir tahun 2023 sebesar 100%. Berdasarkan realisasi Triwulan I tahun 2023, target akhir tahun 2023 tercapai sebesar 20,17%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal-hal yang menunjang tercapainya target bahwa persentase pemenuhan pengujian sesuai standar sampai Triwulan I tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Sinergitas antar bidang terkait yang terlibat dari awal penyusunan prioritas sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang didukung dengan sinergitas antara petugas sampling BBPOM di Mataram ;
2. Peningkatan kompetensi personel penguji di laboratorium sehingga dapat mengimplementasikan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023 dengan baik;
3. Pemenuhan instrumen yang memadai untuk melakukan uji Obat dan Makanan dengan pemenuhan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimal laboratorium yang ditetapkan;
4. Sistem manajemen mutu integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 diupayakan selalu diterapkan secara konsisten.

Agar dapat terus meningkatkan capaian persentase pemenuhan obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi penguji dan inspektur melalui pelatihan secara daring maupun luring
- Pengadaan baku pembanding untuk setiap parameter uji wajib, sehingga parameter uji memenuhi standar
- Penggunaan software remote untuk instrumen laboratorium, sehingga penguji dapat mengoperasikan alat dari rumah saat sedang tidak berada di laboratorium.

b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai Triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.36 Target, realisasi dan capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,0	20,19	134,62	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 20,19% dari target 15,0% sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 134,62% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”.

Dalam rangka melindungi masyarakat NTB dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan BBPOM Mataram melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian laboratorium terhadap makanan olahan yang beredar. Pelaksanaan sampling mengacu Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023, sampling dilakukan di sarana produksi dan distribusi makanan.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari perhitungan:

$$\% \text{ Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

- Sampel makanan yang diperiksa meliputi pemeriksaan sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area
- Sampel makanan yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan

pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium

- Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Tabel 3.37 Rincian realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	% diperiksa dan diuji sesuai standar
676	180	1003	138	20,19

Pada Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan sesuai standar sejumlah 180 sampel makanan dari 676 target produk yang periksa selama tahun 2023 (26,62%). Telah dilakukan pengujian sampel sesuai standar sejumlah 138 sampel dari total 1003 sampel yang diuji (13,75%).

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada akhir tahun 2023 sebesar 100%. Berdasarkan hasil realisasi sampai Triwulan I tahun 2023, target tahun 2023 tercapai sebesar 20,19%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal-hal yang menunjang tercapainya target persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai triwulan I tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Sinergitas antar bidang terkait yang terlibat dari awal penyusunan prioritas sampling Makanan yang didukung dengan sinergitas antara petugas sampling BBPOM di Mataram ;
2. Peningkatan kompetensi personel penguji di laboratorium sehingga dapat mengimplementasikan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023 dengan baik;
3. Sistem manajemen mutu terintegrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 diupayakan selalu diterapkan secara konsisten.

Agar dapat terus meningkatkan capaian persentase pemenuhan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi penguji dan inspektur melalui pelatihan secara daring maupun luring
- Pengadaan baku pembanding untuk setiap parameter uji wajib, sehingga parameter uji memenuhi standar
- Penggunaan software remote untuk instrumen laboratorium, sehingga penguji dapat mengoperasikan alat saat sedang tidak berada di laboratorium.

Sasaran Strategis 7.

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis ketujuh hanya satu indikator yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Mataram**. Penilaian persentase keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara.

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.38 di bawah ini.

Tabel 3.38 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	15,0	39,19	261,25	Tidak dapat disimpulkan

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sampai Triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 39,19% dari target 15,0% atau tercapai sebesar 261,25% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”. Hasil tersebut diperoleh dengan perhitungan:

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Rincian pencapaian target dan realisasi setiap tahap penyelesaian berkas perkara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.39 Target dan realisasi perkara serta keberhasilan penindakan Triwulan I tahun 2023

UPT	Tahapan	Target Perkara		Realisasi Perkara		Koefisien		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Thn 2022	Carry Over	Thn 2022	Carry Over	Tahun Berjalan	Carry Over					
BBPOM Mataram	SPDP	8	2	1		1,000		0,150	15,00%	65,31%	60,00%	39,19%
	Tahap I			2	0	0,750	0,333	0,400	32,50%			
	P21			0	1	0,250	0,333	0,300	13,13%			
	Tahap II			1	1	0,250	0,167	0,150	4,69%			
	Total	8	2	4	2							

Sampai Triwulan I tahun 2023, jumlah kasus yang ditindaklanjuti secara projustitia oleh PPNS BBPOM di mataram sebanyak 2 perkara dari target 8 perkara tahun 2023.

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada akhir tahun 2023 sebesar 99,0%. Berdasarkan hasil realisasi sampai Triwulan I tahun 2023, target tahun 2023 tercapai sebesar 39,59%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan BBPOM di Mataram mencapai target persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan peningkatan kinerja disebabkan beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- Dukungan intelijen Badan POM RI dengan memberikan informasi yang A1 (pasti) terkait adanya pengiriman obat ilegal kewilayah kerja BBPOM Mataram;
- Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan;
- Kerja sama dan koordinasi yang baik antar tim internal PPNS BBPOM di Mataram maupun PPNS di Loka POM di Kabupaten Bima;
- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme intelijen dan PPNS BBPOM di Mataram meningkat, khususnya dalam kegiatan intelijen dan olah TKP. Faktor tersebut berdampak pada ditemukannya alat bukti yang cukup sehingga perkara menjadi terang dan jelas, serta mempermudah penelusuran dan penetapan tersangka;
- Dukungan lintas sektor terutama kepolisian dalam memberikan bantuan teknis, taktis dan upaya paksa kepada PPNS BBPOM Mataram dan kejaksaan dalam penyelesaian perkara di bidang Obat dan Makanan yang semakin meningkat;
- Komitmen perusahaan ekspedisi/jasa pengiriman dalam mengimplementasikan MoU Badan POM vs Asperindo dalam rangka mendukung pencegahan kejahatan dan penegakan hukum Obat dan Makanan yang distribusinya memanfaatkan jasa pengiriman/paket; dan
- Peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar POM di Mataram dan ULPK Badan POM tentang adanya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan intelijen dan penyidikan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Perkuatan jaringan kerjasama dengan Polda NTB dan dalam bentuk penyidikan bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB serta Satres Narkoba Polres (wujud pelaksanaan MoU antara Kapolri dengan Kepala Badan POM RI);
2. Pembentukan dan pembinaan jaringan dengan anggota Asperindo sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan MoU Kepala Badan POM RI vs Asperido;

Agar dapat terus meningkatkan capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi intelijen dan PPNS BBPOM di Mataram terutama terkait dengan *cybercrime* dan pembentukan dan pembinaan jaringan serta komunikasi;
- b. Intensitas koordinasi lintas sektor antara lain dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Kepolisian Resor se Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Negeri se Nusa Tenggara Barat, Badan Intelijen daerah, Komando Resor Militer NTB, Ditjen Bea dan Cukai, Dinas Kesehatan, Badan Narkotik Nasional, Badan Intelijen Negara Daerah NTB, Asperindo dan Organda;
- c. Pelaksanaan kegiatan intelijen awal yang lebih intensif dan dilaksanakan dengan melibatkan jejaring intelijen seperti Badan Intelijen Negara Daerah NTB, Dit Intelkam Polda NTB, intelijen Korem Wirabhakti dan informan; dan
- d. Pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana pendukung kegiatan intelijen dan penyidikan.

Sasaran Strategis 8.**Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup****Balai Besar POM di Mataram yang optimal**

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%). Pada Sasaran Strategis ini terdapat 2 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedelapan ini yaitu :

Tabel 3.40 Indikator dan target kinerja pencapaian sasaran strategis kedelapan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Indeks RB Balai Besar POM di Mataram	89,0
Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram	82,0

Pengukuran capaian indikator kinerja serta analisis capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 8 akan dilakukan pada Triwulan IV atau akhir tahun 2023.

a. Indeks RB Balai Besar POM di Mataram

Nilai indeks ini diperoleh dari penilaian Inspektorat utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) beserta data dukungannya dalam rangka menuju WBK dan WBBM pada Balai Besar POM di Mataram. Hal ini sesuai dengan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi PMPZI tersebut adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta

mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram

Nilai indeks ini diperoleh dari penilaian Inspektorat utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) terhadap penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Gambar 3.2. Bobot Penilaian masing- masing komponen AKIP

Sasaran Strategis 9.
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram
yang berkinerja optimal

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis Kesembilan hanya satu indikator yaitu Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram.

Pengukuran capaian indikator ini akan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2023.

Tabel 3.41 Target Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram	84,00

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Mataram diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen-PAN dan RB No 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25% ; kompetensi memiliki bobot 40% ; kinerja memiliki bobot 30% ; dan disiplin memiliki bobot 5%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Data nilai Indikator indeks profesionalitas ASN diperoleh dari laporan Hasil Evaluasi dari Biro SDM yang hasilnya disampaikan pada akhir tahun 2023/Triwulan IV.

Sasaran Strategis 10.
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data
dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 2 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pencapaian sasaran strategis kesepuluh ini yaitu :

Tabel 3.42 Indikator dan target kinerja pencapaian Sasaran Strategis kesepuluh

Indikator Kinerja	Target Tahunan
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92,0
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal	2,50

Pengukuran capaian indikator kinerja serta analisis capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 10 sampai Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah upaya laboratorium pengujian BBPOM di Mataram untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian dilakukan sesuai Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi Standar Ruang Lingkup Laboratorium, Standar Kompetensi Teknis Laboratorium dan Standar Minimal Peralatan Laboratorium.

b. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal

Capaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal sampai Triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.43 Target, realisasi dan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal	2,50	2,50	100,00	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal sampai Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 2,50 dari target 2,50 atau tercapai sebesar 100% dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”.

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram diperoleh dari Nilai Asesmen oleh Pusat Data dan Informasi Nasional (Pusdatin) BPOM.

Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi diperoleh dari nilai rata-rata penilaian 2 komponen yaitu:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Command Center* (BCC) dengan nilai 1,6 diperoleh dari nilai pemutakhiran data SIPT (1,6) ditambah data keracunan dari aplikasi SPIMKer (0,4);
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM dengan nilai 3 diperoleh dari rata-rata nilai: i) pemanfaatan email *corporate* dengan nilai 3 ii) pemanfaatan *sharing folder* dengan nilai 3; iii) pemanfaatan *dashboard* BCC dengan nilai 3; dan iv) *upload* berita aktual pada *website* BPOM/*subsiste* BBPOM di Mataram dengan nilai 3.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil evaluasi, Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram sampai Triwulan I telah mencapai target dengan capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena rencana aksi telah dilaksanakan antara lain : (i) Mendorong seluruh ASN di BBPOM di Mataram dan Loka POM di Kabupaten Bima untuk memanfaatkan email *corporate* secara optimal; serta (ii) Mengoptimalkan pemutakhiran data SIPT, pemanfaatan *sharing folder* dan upload berita aktual di *website* BPOM ataupun di *subsiste* BBPOM di Mataram.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja ini, langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu mempertahankan nilai indikator yang capaiannya sudah tinggi dan meningkatkan nilai

indikator yang capaiannya masih rendah antara lain: (i) Melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar pelaporan kasus keracunan menggunakan aplikasi SPIMKer; dan (ii) Intensifikasi penginputan data SIPT baik sarana, sampling maupun pengujian (iii) Pemanfaatan *Dashboard* BCC secara optimal, (iv) Mengoptimalkan pemanfaatan email corporate oleh seluruh ASN di BBPOM di Mataram dan (v) Mengoptimalkan upload berita aktual di *website* BPOM ataupun di *subsite* BBPOM di Mataram.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pemanfaatan *e-mail corporate* untuk sosialisasi reformasi birokrasi melalui inovasi KITA RB dan SEGERA
2. Pemanfaatan *sharing folder* untuk keperluan pengawasan produk Obat dan makanansetiap sampling, pengawasan penandaan, pemeriksaan sarana, dan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai produk Obat dan makanan
3. Mengunggah berita aktual di *subsite*mataram.pom.go.id secara rutin sebagai bagian dari dokumentasi dan peliputan kegiatan BBPOM di Mataram yang merupakan bagian dari kegiatan tim publikasi.

Sasaran Strategis 11.

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel

Terdapat 1 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan penacapaian Sasaran Strategis 11 yaitu **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram** dengan target realisasi tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.44 Indikator dan target kinerja pencapaian sasaran strategis kesebelas

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram	97,0

Pengukuran capaian indikator kinerja serta analisis capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram sampai Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram sampai Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 61,36 dari target 55,0 sehingga menghasilkan nilai pencapaian indikator sebesar 111,56 % dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”.

Tabel 3.45 Target, Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram	55,0	61,36	111,56	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram diperoleh dari perhitungan:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram: (Nilai EKA x 60\%) + (Nilai IKPA x 40\%)}$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang berdasarkan reformulasi IKPA tahun 2023 memuat 8 indikator (sebelumnya 13 indikator) yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: (i) Revisi DIPA, (ii) Deviasi Halaman III DIPA,

(iii) Penyerapan anggaran, (iv) Belanja kontraktual, (v) Penyelesaian Tagihan, (vi) UP dan TUP, (vii) Dispensasi, (viii) Capaian Output.

- Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi indikator nilai kinerja anggaran sebesar 60,99 diperoleh dari penjumlahan 40% nilai IKPA sebesar 98,0 (39,2) dan 60% nilai EKA sebesar 36,31 (21,77).

Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan Target akhir Tahun 2023

Penetapan target indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram pada akhir tahun 2023 sebesar 97,0%. Berdasarkan hasil realisasi sampai Triwulan I tahun 2023, target akhir tahun 2023 telah tercapai sebesar 63,26%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Mataram sampai Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target disebabkan karena realisasi nilai EKA maupun IKPA yang relatif tinggi.

Agar dapat meningkatkan Capaian Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Mataram, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Menjaga penyerapan anggaran tiap jenis belanja tiap triwulan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Target Realisasi Minimal			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Belanja Pegawai	20%	50%	75%	95%
2	Belanja Barang	15%	50%	70%	90%
3	Belanja Modal	10%	40%	70%	90%

- Memastikan target output maupun target kinerja dapat dicapai.
- Memastikan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan *Plan of Action* serta Rencana Penarikan Dan (RPD)
- Meningkatkan ketelitian dalam penyampaian dokumen SPM
- Pengelolaan UP dan TUP dengan melaksanakan pertanggungjawaban UP (GUP) ke KPPN tepat waktu minimal 2 kali tiap bulan

- Mengoptimalkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan output yang optimal dari anggaran yang dikeluarkan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan;
2. Pengawasan pelaporan data kinerja dan anggaran secara tepat waktu;
3. Menyusun dan merealisasikan anggaran berdasarkan POA dan RPD sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
4. Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya;
5. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala

III.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 BBPOM di Mataram memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 23,995,139,000,-.

Realisasi anggaran sampai Triwulan I tahun 2023 adalah Rp. 3,705,399,346 atau 15,44%. Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran ini yaitu realisasi belanja pegawai (17,73%) dan belanja barang (13,74%).

Tabel 3.46 Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	SISA (Rp)	%
1.	BELANJA PEGAWAI	10,383,600,000	1,840,967,381	8,542,632,619	(17.73%)
2.	BELANJA BARANG	13,346,539,000	1,833,385,935	11,513,153,065	(13.74%)
3.	BELANJA MODAL	265,000,000	31,046,030	233,953,970	(11.72%)
TOTAL		23,995,139,000	3,705,399,346	20,289,739,654	(15.44%)

Pengelolaan anggaran BBPOM di Mataram senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Perhitungan efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan pada rasio antara capaian output (IKU) dan input (anggaran yang dikeluarkan).

Sampai Triwulan I tahun 2023 BBPOM di Mataram melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 29 indikator kinerja dan 11 sasaran strategis. Dari 7 sasaran strategis yang diukur, diperoleh bahwa seluruhnya dengan tidak efisien, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) sasaran masing-masing sebesar 75%. Sedangkan dari 20 indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, diperoleh seluruh indikator dengan hasil tidak efisien dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator masing-masing sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sumber daya (dana) yang ada, sampai Triwulan I tahun 2023 BBPOM di Mataram belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

BAB IV. PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Evaluasi interim Triwulan I tahun 2023 didasarkan pada Perjanjian Kerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan Reviu Renstra BBPOM di Mataram Tahun 2020-2024. Terdapat 21 kegiatan utama untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja Utama. Sampai Triwulan I tahun 2023 hanya 7 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur capaiannya.

Dari 7 sasaran strategis BBPOM di Mataram yang diukur capaiannya pada triwulan I tahun 2023 diperoleh 4 sasaran strategis dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPS) dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”, 2 sasaran strategis dengan kriteria NPS “belum memenuhi ekspektasi” dan 1 sasaran strategis dengan kriteria NPS “tidak dapat disimpulkan”.

Hasil capaian tiap sasaran strategis sampai Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram” sebesar 93,87% dengan kriteria BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI, menunjukkan BBPOM di Mataram kurang efektif dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Capaian indikator sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram” sebesar 79,58% dengan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI, menunjukkan BBPOM di Mataram tidak efektif meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Capaian indikator sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan” sebesar 104,39% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI menunjukkan BBPOM di Mataram efektif dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Capaian indikator sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram” sebesar 120,0% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI menunjukkan keberhasilan

BBPOM di Mataram dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Capaian indikator sasaran strategis ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram” sebesar 262,25% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini menunjukkan keberhasilan BBPOM di Mataram dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Capaian indikator sasaran strategis kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” sebesar 100% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, menunjukkan BBPOM di Mataram telah berhasil dalam meningkatkan penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
- Capaian indikator sasaran strategis kesebelas “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel” sebesar 111,56% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, menunjukkan BBPOM di Mataram telah berhasil dalam pengelolaan keuangan UPT secara akuntabel.

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sampai triwulan I Tahun 2023, dilakukan pengukuran terhadap 29 indikator kinerja utama (IKU) dengan hasil 7 indikator yang capaiannya dengan kategori MEMENUHI EKSPEKTASI, 8 indikator dengan kategori MEMENUHI EKSPEKTASI, 1 indikator dengan kategori TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI serta 4 indikator dengan kategori TIDAK DAPAT DISIMPULKAN.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Mataram sampai triwulan I Tahun 2023 antara 8,97% sampai dengan 261,25%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” sebesar 8,97%. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan” sebesar 261,25%.

IV.2.Saran

Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan dan capaian kinerja sampai Triwulan I tahun 2023 agar digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya, serta hasil evaluasi di Triwulan I tahun 2023 ditindaklanjuti dan dimonitor pencapaiannya secara berkala, khususnya pada beberapa indikator yang belum mencapai target dan indikator yang capaiannya jauh melampaui target di Triwulan I tahun 2023, agar seluruh target indikator kinerja di triwulan berikutnya dapat tercapai dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Mataram
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Mataram

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 20 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Mataram

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.8
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.75
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.40
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.3
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	84
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
dan Makanan		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	89
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	97

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
23,995,139,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Mataram, 20 Desember 2022
Pihak Pertama



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Mataram
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	784.044.750,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	261.348.250,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	525.309.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	175.103.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	59.371.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												82	258.720.500,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												89,8	76.210.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												78,75	258.720.500,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik LPT												94	258.720.500,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	90.687.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dinklanjuti oleh pemangku kepentingan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	90.687.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	104.898.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	164.860.000,00

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	971.245.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	1.790.370.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4	16	31	40	47	53	59	66	74	83	90	79	81.795.000,00
17.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	135.660.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Penganjutan Anak Sekolah (PIAS) aman	10	20	20	25	25	30	42,5	60	62,5	65	80	84	552.344.100,00
19.	Jumlah desa pangan aman	10	20	25	40	48	66	66	71	83	85	95	25	730.725.100,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	8	15	25	40	50	55	60	70	80	90	100	1.052.038.200,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	8	15	25	40	50	55	60	70	80	90	100	501.706.200,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	99	1.060.812.000,00
23.	Indeks RB UPT											89		7.891.693.500,00
24.	Nilai AKIP UPT											82		1.168.088.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											84		3.413.620.200,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											92		113.783.400,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	208.904.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		50	55	62	65	67	69	71	73	75	80	97	1.038.360.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	20	25	55	55	75	75	85	100	100	8	175.314.300,00

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Total													23.995.139.000,00

Mataram, 20 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Mataram



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.

3. RENCANA KERJA TAHUNAN



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
NOMOR HK.02.02.18A.18A5.07.22.112 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistematika Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 637);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);



- 3 -

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor HK.02.02.18A.18A5.07.22.112 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2023.**



- 4 -

- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MATARAM.

GUSTI AYU RINI ARYAPATNI

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023



- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

NOMOR HK.02.02.18A.18A5.07.22.112 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI MATARAM TAHUN 2023

NO	SABARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
		Persentase pangan bertifikasi yang memenuhi syarat	82
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat awareness index terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,8

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023



- 6 -

	Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Mataram	94
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik	4,55
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023



- 7 -

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,3
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB BBPOM di Mataram	89
		Nilai AKIP BBPOM di Mataram	82
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Mataram	84
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	92
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Mataram yang optimal	2,5

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023



- 8 -

11	Terkelaknya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Mataram	97,0
----	---	---	------

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI

4. Capaian Output Kegiatan Triwulan I 2023

No.	Program/Kegiatan/Output		Target	Realisasi Kumulatif	Progress/Capaian Kumulatif
1	QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman	969	209	21,57
2	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	28	0	29,33
3	EBA.962	Layanan Umum	1	0,25	25,00
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0,25	25,00
5	BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	44	10	22,73
6	QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	84	0	20,00
7	QDB.002	Desa Pangan Aman	25	0	25,00
8	QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	8	0	25,00
9	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0,25	25,00
10	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0,25	25,00

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Ouput		Target	Realisasi Kumulatif	Progress/ Capaian Kumulatif
11	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21,43
12	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	593	244	41,15
13	RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0,25	25
14	CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0,25	25,00
15	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	0,0000	25,00
16	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	571	48	8,41
17	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1542	226	14,66
18	QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	105	75	71,43
19	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	109	25	22,94
20	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	577	139	24,09
21	QCD.U52	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MATARAM	8	4	50

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

5. Nilai Efisiensi masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis Triwulan I 2023

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	87,97	97,74	784.044.750	76.954.169	9,82	9,96	8,96	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	71,43	85,04	261.348.250	25.651.390	9,82	8,66	7,66	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	75	87,21	525.309.000	12.016.838	2,29	38,12	37,12	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	80	105,26	175.103.000	4.005.613	2,29	46,02	45,02	75 %
5	Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85	80	94,12	59.371.000	7.911.440	13,33	7,06	6,06	75 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	77	84,62	104.577.000	16.700.273	15,97	5,30	4,30	75 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76	6,82	8,97	104.577.000	16.700.273	15,97	0,56	-0,44	75 %

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00	104.898.000	4.360.000	4,16	24,06	23,06	75 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	52	86,67	164.860.000	8.191.000	4,97	17,44	16,44	75 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	69,78	102,62	943.465.000	53.292.860	5,65	18,17	17,17	75 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	31	29,33	94,61	81.795.000	2.220.000	2,71	34,86	33,86	75 %
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,3	93,95	97,56	135.660.000	14.151.820	10,43	9,35	8,35	75 %
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	20	100,00	552.344.100	104.648.964	18,95	5,28	4,28	75 %
19	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00	730.725.100	111.165.789	15,21	6,57	5,57	75 %

LAPORAN KINERJA

BBPOM di Mataram Triwulan I Tahun 2023

20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20	25	125,00	175.314.300	36.053.444	20,57	6,08	5,08	75 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	20,17	134,47	1.122.533.000	492.092.529	43,84	3,07	2,07	75 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	20,19	134,60	501.706.200	214.861.973	42,83	3,14	2,14	75 %
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	39,19	261,27	1.060.812.000	117.599.663	11,09	23,57	22,57	75 %
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	2,5	100,00	208.904.000	74.574.440	35,70	2,80	1,80	FALSE
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	55	61,36	111,56	919.561.700	125.841.736	13,68	8,15	7,15	75 %
	TOTAL			105,57	8.716.908.400	1.518.994.212	17,43	6,06	5,06	75 %